

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Jalan Kasatrian No.34, Jeruksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul

(0274)391006

dpk@gunungkidulkab.go.id <https://dpk.gunungkidulkab.go.id>



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2026

KEPALA

ONENG WINDU WARDANA, S.Si., M.Si

NIP. 197109091996031005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan 1 “Terwujudnya peningkatan literasi masyarakat”

- Tujuan “Terwujudnya peningkatan literasi masyarakat” diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks pembangunan literasi masyarakat.
- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 menunjukkan dua hasil pengukuran sebagai dampak perubahan metodologi nasional. Berdasarkan pendekatan perhitungan yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja (metode lama), capaian IPLM tercatat sebesar 63,87, melampaui target daerah sebesar 56,53, atau mencapai 112,99% dari target yang ditetapkan.
- Sementara itu, berdasarkan metodologi terbaru yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2025, nilai IPLM Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 16,67 yang merupakan baseline baru dalam sistem pengukuran nasional.
- Perbedaan angka tersebut merupakan konsekuensi perubahan sistem pembobotan dan skoring nasional, bukan penurunan kinerja pembangunan literasi.

2. Capaian Tujuan “Terwujudnya Kearsipan yang Berkualitas”

Tujuan “Terwujudnya Kearsipan yang Berkualitas” diukur dengan indikator kinerja Tingkat pengelolaan arsip secara baku.

Dengan target sebesar 82,98% dan capaian di tahun 2025 sebesar 82,98%, maka tujuan tercapai 100 %.



3. Capaian sasaran strategis 1 : Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku.

- Diukur dengan indikator Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku (Jumlah PD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku dibagi Jumlah PD dikali 100%).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Pengelolaan Arsip
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 82,98%; terealisasi 82,98%. Dengan demikian capaian ini telah memenuhi target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 100,43% terjadi sedikit penurunan sebesar 0,43%.

4. Capaian sasaran strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

- Diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 80,07; Target terealisasi 80,70 Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,78%.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 103,72% terjadi penurunan sebesar 2,94%

5. Capaian sasaran strategis 3 :Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat

- Sasaran strategis ini diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan dua pendekatan metodologi.

Pertama, menggunakan metode sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yaitu akumulasi nilai 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM 1 s.d. UPLM 7)

Kedua, menggunakan metodologi terbaru Tahun 2025 yang ditetapkan oleh



Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan sistem pembobotan dan skoring nasional yang diperbarui.

.Berdasarkan pendekatan metodologi lama, target Tahun 2025 sebesar 56,53 dapat direalisasikan sebesar 63,87, sehingga capaian kinerja mencapai 112,99% dan melampaui target yang ditetapkan.

- Sementara itu, berdasarkan metodologi terbaru Tahun 2025, nilai IPLM Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 16,67
- Capaian indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 (tiga) program, yaitu Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Namun demikian, perbedaan tersebut merupakan dampak perubahan sistem pengukuran nasional dan tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun sebelumnya, sehingga tidak mencerminkan penurunan kinerja pembangunan literasi daerah secara substantif.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan personal, baik untuk jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis maupun jabatan fungsional umum
2. Kurangnya dukungan dan komitmen dari stakeholder untuk pengembangan bidang perpustakaan dan kearsipan.
3. Minimnya peraturan dan kebijakan serta pedoman teknis bidang perpustakaan dan kearsipan.
4. Minimnya kesadaran minat baca dan kurangnya kesadaran dalam pengelolaan arsip sebagai bagian dari budaya tertib.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan	13
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	24
B. Efisiensi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN	67



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	8
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	9
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025	10
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026.....	13
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	13
Tabel II.3.1.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	14
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	17
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	20
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	21
Tabel II.6	Dukungan Anggaran.....	22
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	25
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	26
Tabel III.4	Capaian Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat .	26
Tabel III.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026.....	26
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	27
Tabel III.7	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat.....	30
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	31
Tabel III.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	31
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	32
Tabel III.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	32



Tabel III.12	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	33
Tabel III.13	Rumusan Indikator dan Formulasi perhitungan sasaran Terwujudnya pembangunan Literasi Masyarakat.....	34
Tabel III.14	Capaian Sasaran Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat	38
Tabel III.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022- 2025	38
Tabel III.16	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	56
Tabel III.17	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.....	5



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- G. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai



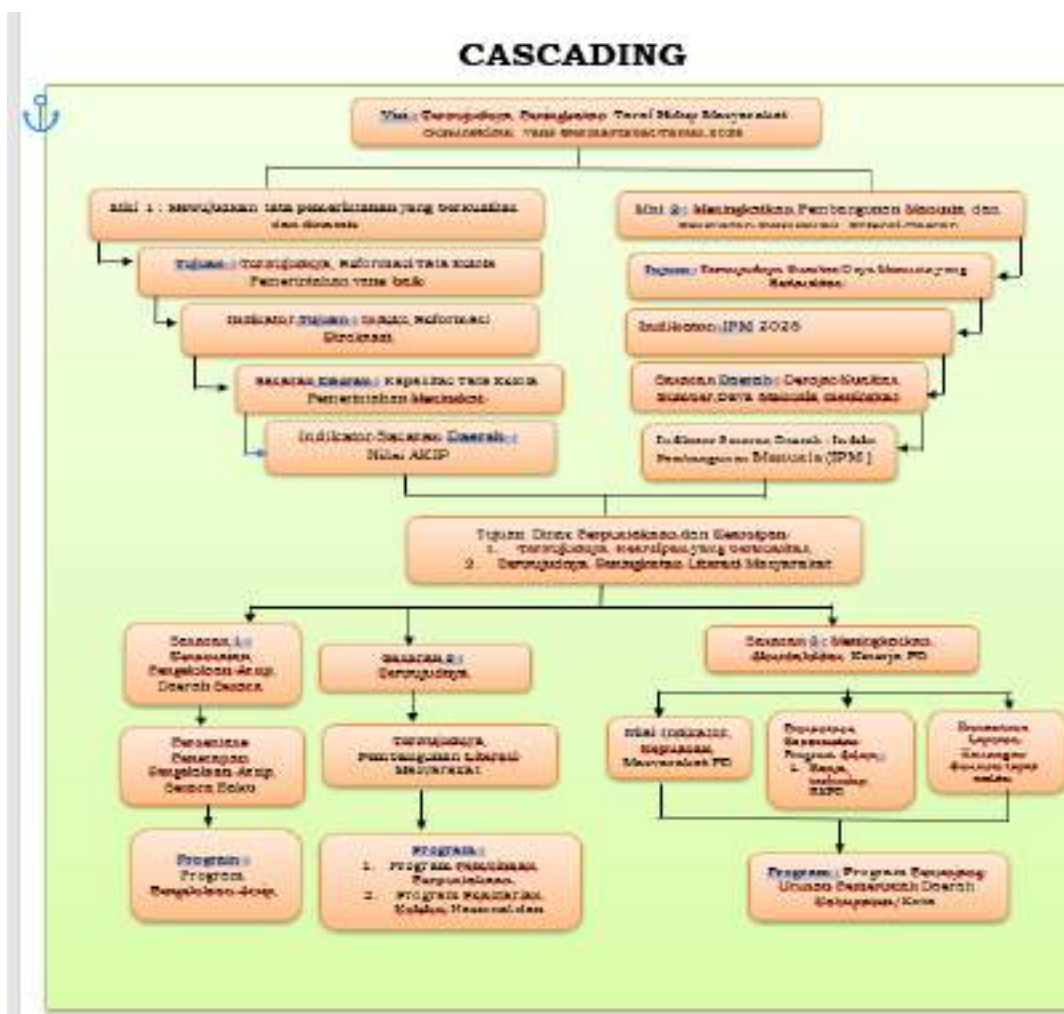
dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



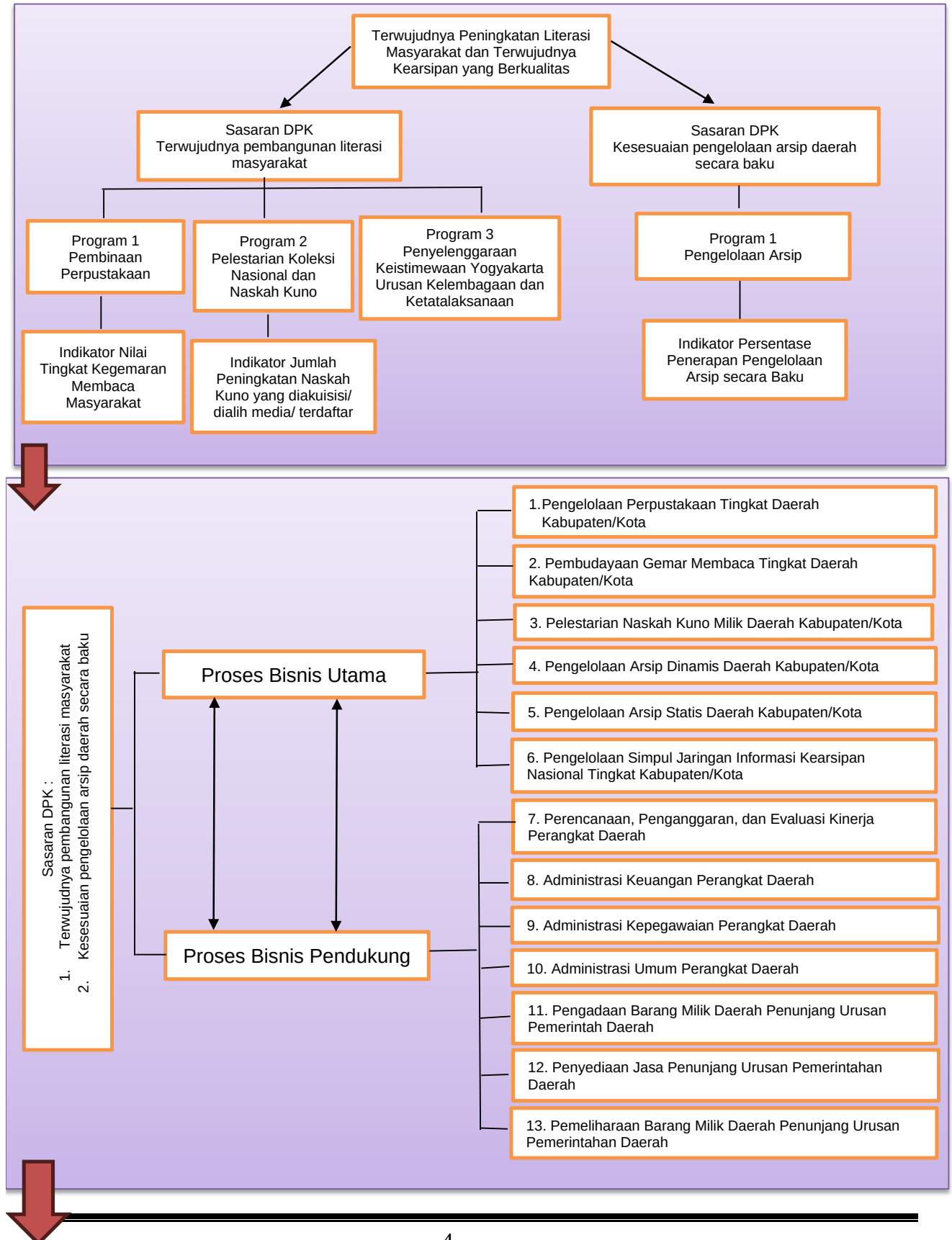
Gambar 1.1. Cascading Kinerja

C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

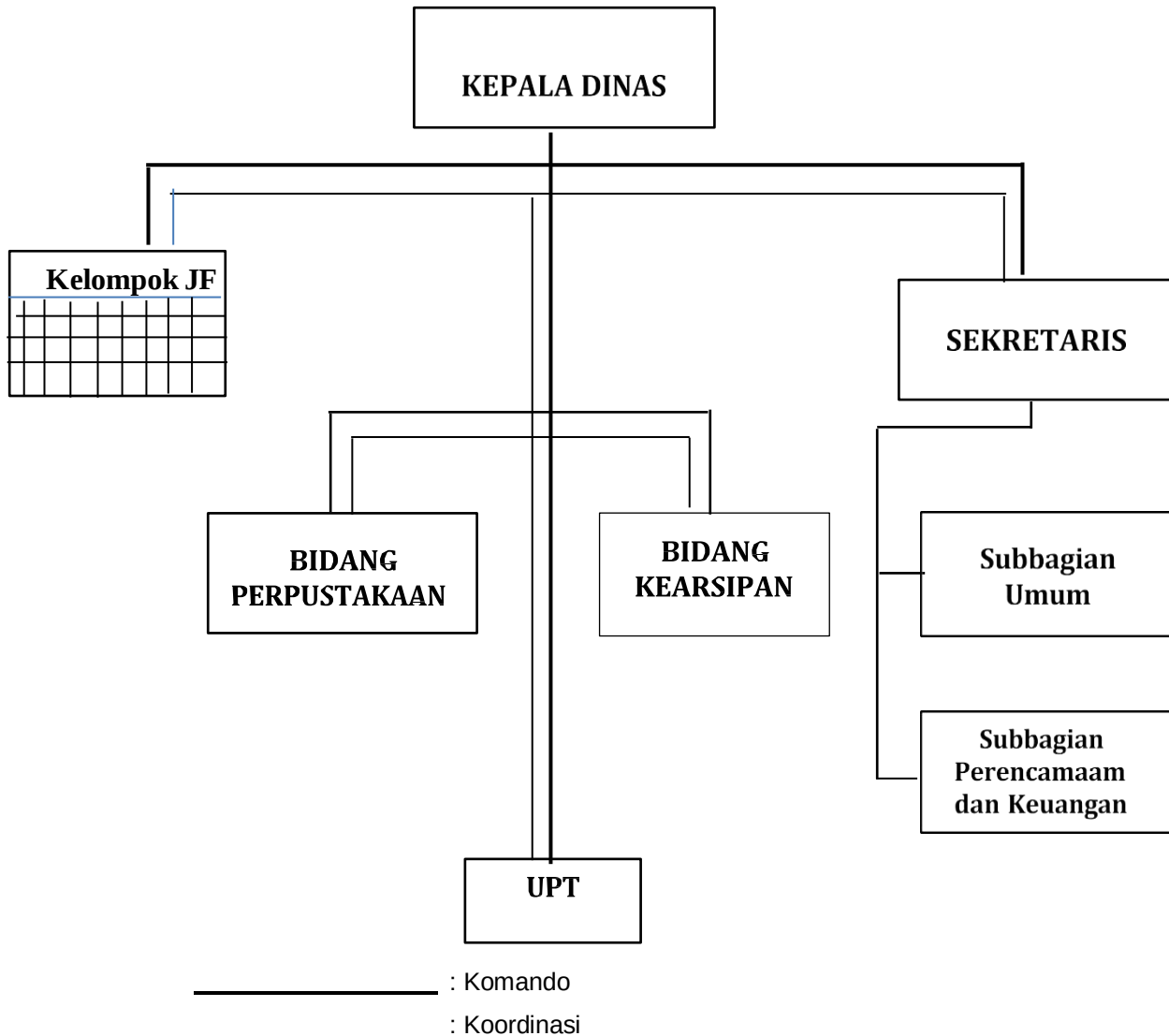


Pemetaan Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



D. Tugas dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dalam Peraturan Bupati



Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- e. Penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan arsip;
- g. Penyelenggaraan perpustakaan daerah, perpustakaan keliling dan kearsipan;
- h. Penyelenggaraan kerjasama kemitraan terkait pengembangan perpustakaan;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi forum-forum komunitas perpustakaan;
- j. Peningkatan budaya kegemaran membaca;
- k. Pengkoordinasian reformasi birokrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Dinas;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perpustakaan dan kearsipan
- m. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- o. Pengelolaan UPT



E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat akibat belum adanya pemahaman tentang kaitan pentingnya menumbuhkan minat baca dengan kemajuan masyarakat
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan lembaga/PD dalam pengelolaan arsip sebagai bagian dari budaya tertib dokumen
- c. Masih minimnya jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dari keseluruhan jumlah perpustakaan binaan
- d. Kurangnya dukungan sarana prasarana kearsipan yang memenuhi standar di lembaga kearsipan dan PD
- e. Minimnya regulasi, kebijakan dan pedoman teknis di bidang perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan;
- f. Kurangnya dukungan dan komitmen dari *stakeholders* untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan



F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				La ki	Per emp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	S2				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3	2	1								1	2
	2. Pengawas	2		2									2
	3. Pelaksana	4			1	3						2	2
C.	Jabatan Fungsional	11	1	8	2							3	8
D	PPPK	9		8		1						5	4
	THL	12		8		4						5	7
	Jumlah	42	3	28	3	8						17	25

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 27 orang (66,70%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (7,15 %), D3 3 orang (7,15%), SLTA 8 orang (19%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, dengan jumlah pegawai perempuan 25 (59,52%) dan pegawai laki-laki sebanyak 17 orang (40,48%) dan 6 orang diantaranya menduduki jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Jumlah SDM Perempuan lebih banyak dari laki-laki dan 6 jabatan struktural 4 dijabat oleh perempuan 2 laki-laki, hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dan penerapan merit sistem dalam manajemen SDM aparatur.



Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	23	2.650.356.836,78
2	Alat-alat Kantor dan	1.065	2.276.224.860,99
3	Rumah Tangga	45	227.974.358,00
	Alat-alat Studio dan		
	Komunikasi		
1	Aset Tetap Lainnya Buku Perpustakaan	12.586	1.060.688.178,80
	Jumlah	13.719	6.215.244.234,57

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025

Kendaraan dinas ada 8 unit terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan dinas jabatan, 6 (enam) unit kendaraan operasional, dan 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1.



Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4	1	02	Retribusi Daerah	0	0	0
			Jumlah Pendapatan			
5			BELANJA DAERAH	5.970.462.437,00	5.723.233.536,00	(247.228.900,32)
5	1		BELANJA OPERASI	5.783.147.437,00	5.551.718.536,67	(231.428.900,32)
5	1	01	Belanja Pegawai	2.319.795.349,00	2.319.795.349,00	0
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.463,352.088,00	3.231.923.187,68	(231.428.900,32)
5	1	05	Belanja Hibah			
5	2		BELANJA MODAL	187.315.000,00	171.515.000,00	(15.800.000,00)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.815.000,00	147.515.000,00	(8.300.000,00)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31.500.000,00	24.000.000,00	(7.500.000,00)
			Jumlah Belanja	5.970.462.437,00	5.723.233.536,00	(247.228.900,32)
			Total Surplus/(Defisit)			
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
			Pembiayaan Neto			

Sumber data:

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul semula Rp 5.970.462.437,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 3.723.233.536,00 atau berkurang Rp.247.228.900,32



Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan efisiensi belanja ATK dan SPPD, tambahan biaya pemasangan AC, tambahan untuk Belanja Minum Snak Penyelenggaran Forkom Perpustakaan dan Kearsipan se DIY, tambahan THR THL dan penambahan anggaran pembelian sprayer ,penambahan mesin bor ,penambahan belanja bahan kimia .



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dan Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan dan meningkatnya pembangunan manusia. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

Terwujudnya peningkatan Literasi masyarakat dan peningkatan Kearsipan yang berkualitas Adapun sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kegemaran membaca di masyarakat
2. Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku



Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	76,59	78,26	80,43	82,61	82,98	86,95	86,95
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,89	78,89	80,02	80,05	80,07	80,09	80,09
3	Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	21,0743	22,1138	22,6038	23,1050	56,53	24,1679	24,1679

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku	Peningkatan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Daerah	Meningkatkan Pengelolaan arsip daerah sesuai Kaidah Kearsipan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Koordinasi Penunjang Urusan PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP
3	Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan dan pemasyarakatan gemar membaca	Peningkatan Budaya Literasi melalui Pengelolaan Perpustakaan terstandar dan Pemasyarakatan kegemaran membaca



C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel beriku

Tabel II.3.1 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	492.301.500,00	425.532.500,00	(66.769.000,00)
	Kegiatan :			
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	173.570.000,00	144.020.000,00	(29.550.000,00)
	Sub Kegiatan :			
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	5.825.000,00	5.825.000,00	0
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	167.745.000,00	38.195.000,00	(29.550.000,00)
	Kegiatan :			
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	218.789.000,00	197.620.000,00	(21.169.000,00)
	Sub Kegiatan :			
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	218.789.000,00	197.620.000,00	(21.169.000,00)
	Kegiatan :			
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	99.942.500,00	83.892.500,00	(16.050.000,00)
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	99.942.500,00	83.892.500,00	(16.050.000,00)
Terwujudnya Pembangunan Litearsi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.479.964.500,00	1.448.440.500,00	(31.524.000,00)
	Kegiatan :			



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Masyarakat	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	654.792.000,00	627.198.000,00	(27.594.000,00)
	Sub Kegiatan :			
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.329.000,00	52.199.000,00	(6.130.000,00)
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	153.034.700,00	134.930.700,00	(18.104.000,00)
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	45.526.400,00	43.646.400,00	(1.880.000,00)
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	136.835.000,00	136.065.000,00	(770.000,00)
	Pengembangan Kekhasan Koleksi perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten /Kota	245.076.900,00	245.076.900,00	0
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	15.280.000,00	15.280.000,00	0
	Kegiatan :			
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0
	Sub Kegiatan :			
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	98.659.800,00	94.729.800,00	(3.930.000,00)
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.590.000,00	35.590.000,00	0
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	498.474.000,00	503.939.000,00	5.465.000,00
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	192.448.700,00	186.983.700,00	(5.465.000,00)



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	129.673.500,00	128.953.500,00	(720.000,00)
	Kegiatan :			
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	129.673.500,00	128.953.500,00	(720.000,00)
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	116.673.500,00	116.673.500,00	0
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	13.000.000,00	12.280.000,00	(720.000,00)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	172.290.000,00	102.665.000,00	(69.625.000,00)
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	172.290.000,00	102.665.000,00	(69.625.000,00)
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	172.290.000,00	102.665.000,00	(69.625.000,00)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025



Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.354.731.286,68	3.354.731.286,68	(24.809.900,32)
	Kegiatan :			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.587.400,00	50.787.400,00	200.000,00
	Sub Kegiatan :			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	9.042.400,00	9.042.400,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.475.000,00	30.675.000,00	200.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.420.000,00	1.420.000,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.450.000,00	1.450.000,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.150.000,00	1.150.000,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.435.000,00	4.435.000,00	0



No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.615.000,00	2.615.000,00	0
	Kegiatan :			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.390.627.549,00	2.319.795.349,0	400.000,00
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.319.795.349,00	2.319.795.349,0 0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	68.832.200,00	69.232.200,00	400.000,00
	Kegiatan :			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.466.000,00	24.466.000,00	0
	Sub Kegiatan :			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.466.000,00	24.466.000,00	0
	Kegiatan :			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.562.750,00	180.231.750,00	(59.331.000,00)
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.964.250,00	9.964.250,00	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.017.000,00	93.537.000,00	(480.000,00)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.604.500,00	7.439.500,00	(165.000,00)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.400.000,00	13.450.000,00	1.050.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.127.000,00	50.691.000,00	(59.436.000,00)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.450.000,00	5.150.000,00	(300.000,00)
	Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.175.156,00	534.175.156,00	(13.000.000,00)
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.240.000,0	42.840.000,00	(13.400.000,00)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.165.556,00	282.165.556,00	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.769.600,0	209.169.600,00	400.000,00
	Kegiatan :			



No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.151.082,00	378.741.181,68	(12.409.900,32)
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	391.151.082,00	378.741.181,68	(12.409.900,32)
	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	1.500.000,00	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.635.000,0	27.235.000,00	(12.400.000,00)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.498.582,00	95.398.581,68	25.899.999,68
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000,00	13.500.000,00	6.000.000,00
	Total Anggaran Pendukung		3.617.642.036,68	

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:



Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Kearsipan yang berkualitas	Persentase Pengelolaan arsip secara baku	Persen	84,78
2	Terwujudnya peningkatan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat.	Indeks	23,6308

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Kesesuaian pengelolaan arsip daerah secara baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	84,78	Triwulan I	84,78
					Triwulan II	84,78
					Triwulan III	84,78
					Triwulan IV	*84,78
2.	Terwujudnya pembangunan literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	23,6308	Triwulan I	23,6308
					Triwulan II	23,6308
					Triwulan III	23,6308
					Triwulan IV	*23,6308

Pada tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya efisiensi belanja dan mendasar pada capaian kinerja tahun sebelumnya serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Kearsipan yang berkualitas	Persentase Pengelolaan arsip secara baku	Persen	84,78
2	Terwujudnya peningkatan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat.	Indeks	23,6308

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Kesesuaian pengelolaan arsip daerah secara baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	82,98	Triwulan I	82,98
					Triwulan II	82,98
					Triwulan III	82,98
					Triwulan IV	*82,98
2.	Terwujudnya pembangunan literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	56,53	Triwulan I	56,53
					Triwulan II	56,53
					Triwulan III	56,53
					Triwulan IV	*56,53

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:



Tabel II.6 Dukungan Anggaran

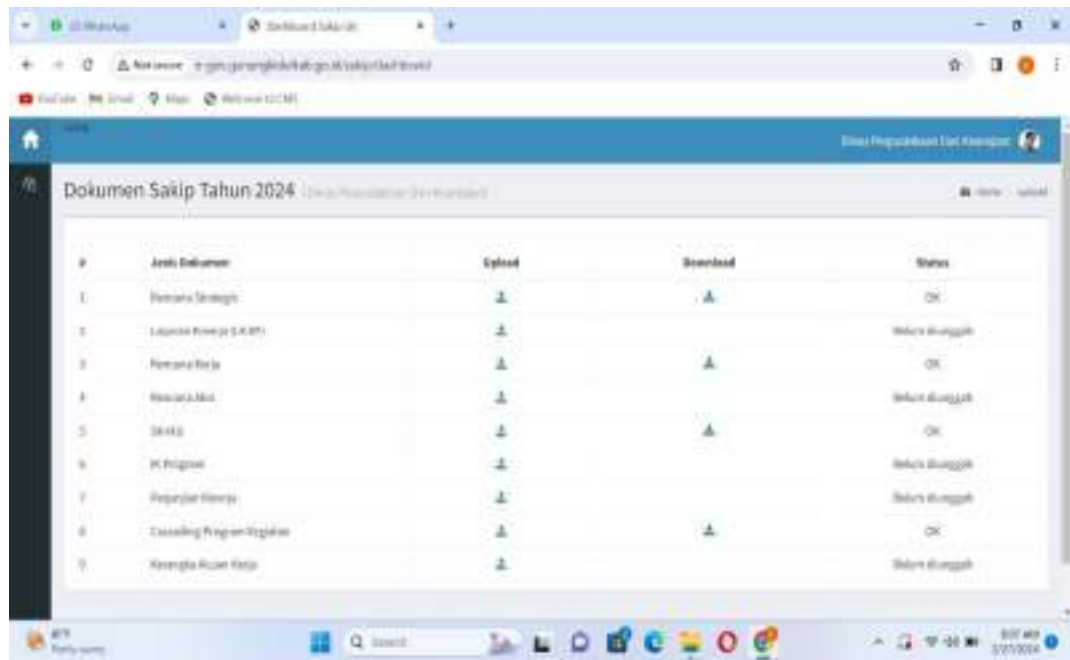
Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Pengelolaan Arsip	425.532.500,00	APBD
Program Pembinaan Perpustakaan	1.448.440.500,00	APBD-DAK
Program Pelesatarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	128.953.500,00	APBD-DAK
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	102.665.000,00	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.617.642.036,68	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja berubah, anggaran juga berkurang sebesar 4,14% sehubungan adanya efisiensi pada belanja ATK dan SPPD.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Gambar 2.1. E-SAKIP



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Realisasi Anggaran
- C. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	$\frac{\sum \text{PD yang menerapkan pengelolaan arsip scr baku}}{\sum \text{Total PD}} \times 100$	Persen	76,59	82,97	82,98	82,98	100	Sangat Tinggi	86,95
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Indikator: Nilai AKIP PD Meta Indikator: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)	skor	78,89	83,03	80,07	80,70	100,79	Sangat Tinggi	80,09
3	Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat	Jumlah dari $\frac{\text{UPLM1}+\text{UPLM2}+\text{UPLM3}+\text{UPLM4}+\text{UPLM5}+\text{UPLM6}+\text{UPLM7}}{7} \times 100$ (Dengan Rumus Lama)	Indeks	21,0743	56,03	56,53	63,87	112,98	Sangat Tinggi	24,1679
		Perhitungan dari Perpustakaan sesuai dengan regulasi terbaru	Indeks	-	-	-	16,67	-		

Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan target sebesar 56,53, yang dihitung menggunakan pendekatan 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (7 UPLM) sebagaimana digunakan pada periode sebelumnya.

Pada Tahun 2025, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menetapkan perubahan instrumen dan metodologi pengukuran IPLM melalui Peraturan Kepala



Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Metodologi baru menggunakan pendekatan berbasis dimensi kinerja (70%) dan dimensi kepatuhan/fisik (30%) serta tidak lagi bersifat agregatif kewilayahan sebagaimana metode sebelumnya.

Perubahan tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendekatan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan mekanisme pengukuran nasional tahun berjalan. Oleh karena itu, penyajian capaian kinerja IPLM Tahun 2025 akan disampaikan dengan mempertimbangkan kedua pendekatan tersebut.

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku

Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah secara baku diukur dengan cara dilakukan penilaian terhadap pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku yang mempunyai nilai sangat baik dan baik. Rumus perhitungan yang diterapkan Jumlah PD yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara baku dibagi jumlah PD dikalikan 100%.



Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	$\frac{\sum \text{PD yang menerapkan pengelolaan arsip scr baku}}{\sum \text{Total PD}} \times 100$

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.4 berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran
Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	82,98	82,98	100	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100,%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 82,98 sesuai dari target yang ditetapkan sebesar 82.98

Realisasi kinerja sebesar 82,98 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, 2022 dan tahun 2023, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025
serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025		
Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	78,59	78,72	80,85	82,97	82,98	86,95	95,43



Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Arsip. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	$\frac{\sum \text{PD yang menerapkan pengelolaan arsip scrbaku}}{\sum \text{Total PD}} \times 100$

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku sebagai berikut:

Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	100,43	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	100	Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dalam upaya mencapai Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan di Renstra telah dilakukan berbagai kegiatan seperti dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 3.1
Bintek pengelolaan arsip bagi arsiparis, 14 - 15 Januari 2025



Gambar 3.2
pendampingan pengelolaan arsip kalurahan, Februari 2025



Gambar 3.3
Rakor kepala unit kearsipan, 24 Maret 2025



Gambar 3.4
Bimtek Pengelolaan Arsip Kalurahan



Gambar 3.5
Monev Srikandi 2025



Gambar 3.6
Forum Komunikasi Arsip 2025



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang sampai saat ini tenaga Arsiparis yang dimiliki hanya 5 (lima) orang, idealnya 8-12 orang.
2. Minimnya Sarana dan Prasarana pendukung, untuk layanan Kearsipan, antara lain tidak ada kendaraan roda 4 untuk operasional Arsip.
3. Kurangnya kepedulian Perangkat Daerah untuk pengelolaan arsip

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Rekrutmen Tenaga Arsiparis untuk memenuhi kekurangan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Prioritas pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan arsip, seperti kendaraan roda 4 dan prasarana lain yang dibutuhkan
3. Terus melakukan pembinaan Kearsipan ke Perangkat Daerah.
4. Melibatkan arsiparis perangkat daerah lain untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Membuka konsultasi secara luring tentang teknis pengelolaan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
6. Membuat forum komunikasi antar pengelola arsip pemerintahan kalurahan dan perangkat daerah sebagai wadah berkomunikasi dan konsultasi secara elektronik dan cepat (WA group, WEB)
7. Menyusun dan melengkapi regulasi di bidang kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis pengelolaan kearsipan pada pemerintah kabupaten.
8. Membuat Video pengelolaan arsip.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Komitmen dari para pemegang manajemen dari perangkat daerah serta petugas arsip dalam mengelola kearsipan
2. Dukungan dari stake holder khususnya pemberian dana /anggaran melaluia APBD
3. Semangat dan inovasi dari para petugas dalam mengikuti langkah-langkah yang ditentukan dari pusat serta pelatihan dan Bimtek juga mengimplementasikan dalam pekerjaan.



Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi data: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Tabel III.9 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80,07	80.70	100,79	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 80,07 terealisasi 80,70 sehingga capaian kinerja sebesar 100,79%. Dalam LHE AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.



Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 serta
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Baseline	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025			
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80,71	81,74	82.40	83,03	80,70	80,09	100,76	

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 yaitu 80,71(A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
2	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$



Tabel III.12 Capaian Kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	100,79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.



Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Tabel III.13 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Kondisi/Catatan	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	PERENCANAAN KINERJA	Agar dalam penentuan target kinerja pada periode perencanaan yang akan datang mendasar analisis yang memadai, sehingga achievabel, menantang dan realistis.	Ditindaklanjuti dengan surat pernyataan kepala dinas.
2	PENGUKURAN KINERJA	a. Pimpinan unit kerja agar meningkatkan pemahaman dan ketertiban dalam memantau seluruh proses pengukuran kinerja yang harus dicapai sesuai yang diperjanjikan kinerja yang telah ditetapkan. b. Agar pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumen yang valid dan benar secara jelas dan memadai untuk perhitungan capaian target yang ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja sehingga perhitungan capaian kinerja menjadi tepat dan benar. c. Agar pengumpulan data kinerja dapat mendukung capaian kinerja berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja pada pelaporan yang akan datang. d. Agar setiap jenjang melakukan verifikasi dan penelusuran sampai sumber data, atas pengukuran capaian kinerja sebagai quality control dalam pelaksanaan validasi. e. Melakukan pengukuran kinerja secara tepat, sebagai alat untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja. f. Agar setiap unit memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. g. Membentuk forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang sampai dengan tataran individu dalam	Ditindaklanjuti dengan surat pernyataan kepala dinas.



		rangka pengukuran kinerja agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	
	-	Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	
3	PELAPORAN KINERJA	a. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat, sehingga penyajian capaian kinerja dilakukan secara tepat. b. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat sehingga penyajian capaian kinerja dilakukan secara tepat dan berkualitas. c. Agar Laporan Kinerja menjadi perhatian utama dan kepedulian oleh pimpinan unit. d. Agar laporan kinerja menjadi perhatian dan kepedulian oleh jenjang organisasi. e. Agar laporan kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian dan evaluasi untuk perbaikan aktivitas untuk mencapai kinerja. f. Agar laporan kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. g. Agar laporan kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. h. Agar laporan kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian dan evaluasi perbaikan budaya kinerja organisasi.	Ditindaklanjuti dengan surat pernyataan kepala dinas.
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas Kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar perubahan kebijakan /kegiatan/anggaran	Telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan perbaikan sesuai hasil LHE AKIP Internal



Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Masih kurangnya SDM dalam dalam rangkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Minimnya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan
3. Belum Optimalnya sarana dalam penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan tambahan ASN dan pengisian jabatan yang kosong ke BKPPD dan mengoptimalkan SDM yang sudah ada.
2. Memprioritaskan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ada
3. Mengusulkan belanja sarana pada Rencana Kerja dan Anggaran setiap Tahun Anggaran.

Sasaran 3: Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat

Sasaran “Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat” diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). (UPLM). UPLM bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna



meningkatkan literasi masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilahirkan sebagai upaya formulasi kebijakan serta pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan secara nasional, di mana ada kebutuhan akan ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan pada aspek-aspek yang berdasar pada Standar Nasional Perpustakaan.

Dengan adanya pengukuran IPLM, lembaga perpustakaan baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi/kabupaten dapat mengetahui aspek-aspek mana saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan serta aspek yang harus diperkuat dan dibangun agar kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dapat dilakukan secara lebih menyasar dan efektif.

Unsur pembangun literasi masyarakat itu sendiri mencakup 7 (tujuh) unsur yaitu pertama, pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1). Kedua, ketercukupan koleksi (UPLM2). Ketiga, ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3). Keempat, tingkat kunjungan masyarakat per hari (UPLM4). Kelima, jumlah perpustakaan binaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (UPLM5). Keenam, keterlibatan masyarakat (jumlah peserta) dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan secara onsite maupun online (UPLM6). Sedangkan unsur ketujuh adalah jumlah anggota perpustakaan (UPLM7).

Pada Tahun 2025, pengukuran IPLM secara nasional dilakukan menggunakan metodologi terbaru yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Metodologi baru tersebut menggunakan pendekatan berbasis dimensi kinerja (70%) dan dimensi kepatuhan/fisik (30%), sehingga tidak sepenuhnya sebanding dengan pendekatan 7 UPLM yang menjadi dasar penetapan target daerah.

Sehubungan dengan perbedaan tersebut, analisis capaian kinerja Tahun 2025 disajikan dengan dua pendekatan guna menjaga konsistensi terhadap target daerah sekaligus mengakomodasi kebijakan nasional.



Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Metode Lama : Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan, UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan $IPLM \text{ Kab/Kota} = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$ Keterangan: IPLM Kab/Kota = Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota UPLMi = Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat
			Metode Baru : Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Instrumen dan Metodologi Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Berdasarkan regulasi tersebut, penghitungan IPLM dilakukan dengan pendekatan baru yang lebih menitikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen dan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen, serta disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi



Tabel III.14 Capaian Sasaran Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kategori
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM Metode Lama – 7 UPLM)	56,53	63,87	112,98	Sangat Tinggi
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Metode Baru – Perpusnas 2025)	-	16,67		

1. Capaian terhadap Target Daerah (Pendekatan Metode Lama 7 UPLM)

Berdasarkan simulasi penghitungan menggunakan metode 7 UPLM, nilai IPLM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 mencapai 63,87. Dengan target sebesar 56,53, maka capaian kinerja adalah 112,99%. Dengan demikian, realisasi sasaran pembangunan literasi masyarakat telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan dengan capaian 112,99%, maka realisasi kinerja IPLM pada tahun 2025 termasuk kategori Sangat Tinggi.

. Secara komposisi, unsur pembentuk IPLM menunjukkan variasi capaian sebagai berikut:

No	Unsur (UPLM)	Nilai	Analisis Singkat	Arah Perbaikan
1	Pemerataan layanan perpustakaan	0,1771	Layanan perpustakaan belum merata di seluruh wilayah, terutama pada tingkat desa/kelurahan	Perluasan jangkauan layanan, penguatan perpustakaan desa, dan optimalisasi perpustakaan keliling
2	Ketercukupan koleksi	0,771	Koleksi relatif memadai, namun masih perlu peningkatan kualitas dan relevansi	Penambahan koleksi berbasis kebutuhan masyarakat dan literasi digital
3	Ketercukupan tenaga perpustakaan	1	Ketersediaan tenaga perpustakaan telah memenuhi standar	Peningkatan kapasitas dan kompetensi berkelanjutan
4	Tingkat kunjungan masyarakat	1	Tingkat kunjungan menunjukkan partisipasi masyarakat yang baik	Penguatan program inovatif untuk menjaga tren kunjungan



5	Perpustakaan ber-SNP	1	Standar Nasional Perpustakaan telah terpenuhi	Pemeliharaan standar dan peningkatan kualitas layanan
6	Keterlibatan masyarakat	0	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpustakaan belum optimal	Penguatan program literasi berbasis komunitas dan kolaborasi lintas sektor
7	Anggota perpustakaan	0,5231	Jumlah anggota cukup namun belum merata	Strategi peningkatan keanggotaan aktif, terutama generasi muda

Tiga unsur (UPLM 3, UPLM 4, dan UPLM 5) telah mencapai nilai maksimal, yang menunjukkan optimalnya aspek layanan, dukungan kelembagaan, dan ketersediaan fasilitas pendukung literasi. Namun demikian, UPLM 6 yang bernilai 0,0000 serta UPLM 1 yang masih relatif rendah menjadi faktor pembatas peningkatan skor secara lebih signifikan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ruang perbaikan pada aspek tertentu guna mendorong peningkatan kategori indeks di masa mendatang.

2. Capaian IPLM Kabupaten Gunungkidul dalam Metodologi Baru

Berdasarkan penghitungan nasional menggunakan metodologi terbaru, nilai IPLM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebesar 16,67. Nilai ini merupakan baseline baru dalam sistem pengukuran nasional.

Benchmarking dengan Standar Nasional atau Daerah Lain

Nilai IPLM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebesar 16,67 juga berada di atas rata-rata nasional kabupaten/kota yang tercatat sebesar 10,37. Di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, posisi Kabupaten Gunungkidul (16,67) berada di bawah Kota Yogyakarta (25,53) dan Kulon Progo (20,47), namun masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sleman (11,14) dan Kabupaten Bantul (8,41). Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Gunungkidul tetap kompetitif di tingkat regional maupun nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif posisi Kabupaten Gunungkidul tetap kompetitif di tingkat regional maupun nasional.



Capaian realisasi kinerja pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan dengan target Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025
Serta dengan perbandingan Targe Akhir Renstra di Tahun 2026**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2025 terhadap 2026
		2022	2023	2024	2025 22 220		
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (dengan rumus lama)	53,10	73,39	56,03	63,87	24,1679	264,27
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (dengan metodologi berdasar regulasi terbaru)				16,67		

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel di atas, dapat ditegaskan bahwa perbedaan angka IPLM Tahun 2025 merupakan dampak transisi kebijakan pengukuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, dan bukan merupakan indikasi penurunan kinerja pembangunan literasi. Nilai 16,67 merupakan baseline baru dalam sistem pengukuran nasional, sedangkan secara substansi capaian kinerja daerah Tahun 2025 sebesar 63,87 menunjukkan bahwa target pembangunan literasi telah terlampaui.

Dengan mempertimbangkan adanya perubahan kebijakan pengukuran tersebut serta kebutuhan menjaga konsistensi antara perencanaan dan evaluasi kinerja daerah, maka diperlukan langkah penyesuaian dalam dokumen perencanaan yang berlaku. Ke depan, diperlukan penyesuaian target (re-targeting) dalam dokumen perencanaan daerah agar selaras dengan instrumen dan metodologi terbaru, sehingga evaluasi kinerja pembangunan literasi tetap akuntabel, proporsional, dan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didukung dengan Program

Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Dalam Upaya mencapai Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan di Renstra telah dilakukan berbagai kegiatan seperti dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 3.7
Layanan LAJANG CAKAP



Gambar 3.8
Layanan Perpustakaan Keliling



Gambar 3.9 Layanan Epusda Gunungkidul



Gambar 3.10 Workshop dan Ekspose hasil Pendataan Naskah Kuno 2025



Gambar 3.11
Ekspose dan evaluasi Sajisaka Tahun 2025



Gambar 3.12
Bimtek Kepenulisan Konten Lokal



Gambar 3.13
Lomba Video Konten Literasi



Gambar 3.14
Lokakarya Literasi Digital



Gambar 3.15
Festival Literasi

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

1. Perbedaan mekanisme pengukuran IPLM. dan Perhitungan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya berperan dalam penyediaan data. Kondisi tersebut mengakibatkan masih ditemukannya data ganda serta ketidaksesuaian pengisian survei oleh responden dengan ketentuan Perpusnas. Akibatnya, banyak data yang harus dihapus dalam proses pembersihan data (data cleaning) oleh Perpusnas, sehingga berdampak signifikan terhadap hasil akhir penghitungan IPLM.
2. Masih rendahnya pemahaman responden terhadap petunjuk pengisian survei IPLM, masih banyaknya responden yang mengisi data tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Perpusnas, serta keterbatasan waktu pengisian survei yang menyebabkan data tidak dapat diverifikasi secara optimal sebelum dikirimkan.
3. Pemahaman tentang pentingnya budaya membaca, pentingnya buku dan fungsi perpustakaan, baik di lingkup masyarakat maupun di masing-masing OPD masih rendah, sehingga belum menjadi program prioritas, karena pembangunan fisik masih menjadi primadona.
4. Belum banyak Lurah yang mempunyai komitmen dalam mengembangkan



Perpustakaan.

5. Alokasi anggaran untuk penyediaan koleksi baik buku maupun non buku khususnya di perpustakaan daerah/desa/komunitas/sekolah/khusus sebagian besar belum memenuhi ketentuan Standar Nasional Perpustakaan, khususnya di Perpustakaan karena keterbatasan APBD dan plafon anggaran

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman responden melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian survei IPLM sebelum periode pengumpulan data dimulai. Selain itu, diperlukan penguatan pendampingan dan monitoring selama proses pengisian survei, serta pengaturan waktu pengisian yang lebih longgar agar data dapat diverifikasi dan diminimalkan terjadinya kesalahan maupun duplikasi data sebelum dilakukan penghitungan oleh Perpustakaan.
2. Membuat kebijakan terkait dengan penumbuhan minat baca di masyarakat dan menyediakan layanan baca berupa pojok baca, menindak lanjuti Perbub Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pojok Baca di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta penggalangan bantuan buku melalui program SAJISAKA (SAtu Jiwa SAtu PustaKA) dalam rangka memberikan hibahbuku bagi perpustakaan/lembaga yang membutuhkan.
3. Sinergitas OPD terkait dukungan kebijakan penyelenggaraan dana desa dalam membangun sarana prasarana perpustakaan desa/kalurahan dan mewujudkan perpustakaan sekolah/madrasah, desa/kalurahan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
4. Mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan buku/koleksi di Perpustakaan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

1. Adanya kesadaran akan pentingnya membaca buku di dalam seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak hingga masyarakat lain pada umumnya
2. Koleksi buku di perpustakaan dimanfaatkan secara maksimal oleh pemustaka
3. Koleksi buku digital (epusdagunungkidul) dimanfaatkan secara maksimal oleh pemustaka.



B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan kepada masyarakat umum di bidang perpustakaan dan kearsipan telah menyediakan beragam fasilitas untuk kelompok rentan. Fasilitas ini bertujuan agar layanan dapat diakses dengan mudah dan aman oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak dan ibu menyusui. Fasilitas yang tersedia adalah :

- a. Ruang laktasi berukuran 5 m², yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan sofa, meja, ruang tertutup, dan lemari pendingin untuk penyimpanan ARSIP
- b. Bangunan ramah disabilitas Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan: pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
- c. Halaman luas dengan tempat parkir yang mudah diakses
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.



*Gambar 3.16
Ruang Laktasi*

Untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara konsisten melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 mencapai 89,71 dengan kategori Sangat Baik. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 89,66 yang menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Peningkatan nilai IKM tersebut mencerminkan bahwa upaya perbaikan pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan responsivitas petugas, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



2. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Untuk capaian kinerja lainnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Persepektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintergrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan . Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif

terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipatif, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (Lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin , lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas

Analisis Pengarusutamaan Gender (PUG) Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah termasuk di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam rangka mendukung pengarusutamaan gender, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan kegiatan :

- LAJANG CAKAP

LAJANG CAKAP merupakan singkatan dari Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka sebagai upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dalam rangka meningkatkan Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat. Program Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka merupakan pengembangan dari program kunjung perpustakaan yang sudah dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul sebelum tahun 2018. Sebelum tahun 2018, program kunjung perpustakaan dilakukan dengan biaya dan armada secara mandiri dari lembaga yang melakukan kunjungan. program kunjung perpustakaan yang disebut sebagai LAJANG CAKAP ini difasilitasi secara lebih lengkap dan gratis oleh DPK dengan menyediakan moda transportasi bus untuk antar jemput pemustaka. Program kunjung perpustakaan ini juga difasilitasi dengan pemberian snack ringan.



Gambar 3.17

Lajang Cakap (Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka)

- **Layanan Perpustakaan Keliling .**

Perpustakaan keliling adalah bagian dari pelayanan perpustakaan umum yang mendatangi atau mengunjungi pembacanya dengan menggunakan kendaraan, baik darat mobil atau motor maupun di air atau menggunakan perahu. Dengan kata lain perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang bergerak dengan membawa bahan perpustakaan untuk melayani masyarakat dari satu tempat ke tempat lain yang belum terjangkau oleh perpustakaan umum.



*Gambar 3.18
Layanan Perpustakaan Keliling*

Capaian Kinerja Lainnya Pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 mendapatkan 3 (tiga) penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan dari Marksplus Institute Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul atas pelayanan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025
2. Penghargaan dari Perpustakaan Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu best practice atau Pengalaman Terbaik.
3. Penghargaan dari Bupati Gunungkidul Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Peringkat I kategori Badan/Dinas dalam pengawasan kearsipan Internal tahun 2025.

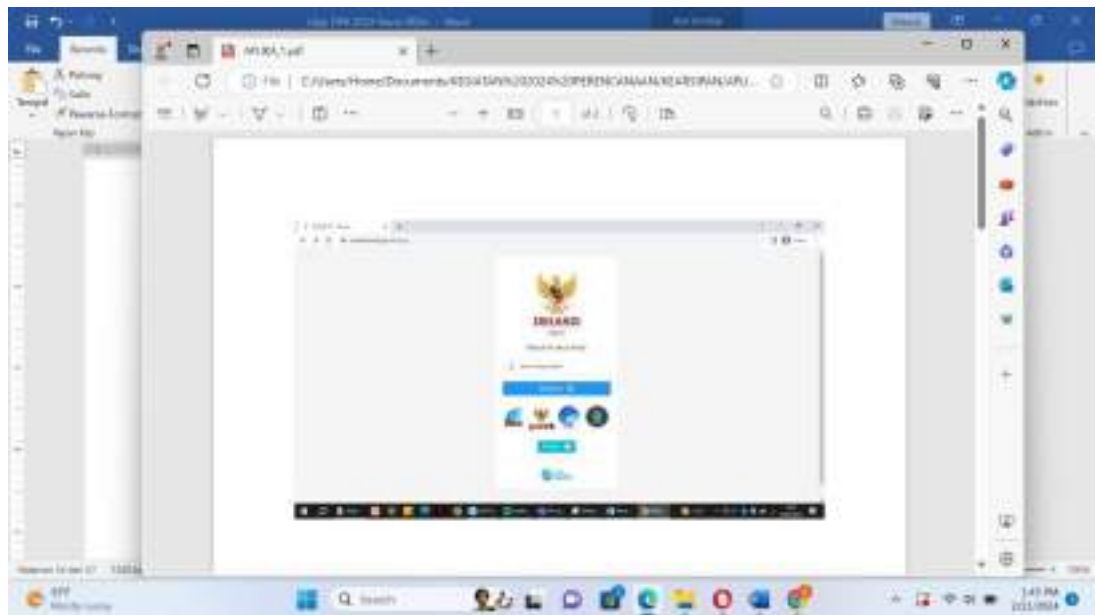


2. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pengelolaan kearsipan digital dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dalam pengelolaan kearsipan yang terintegrasi yang dapat mendukung pengelolaan kearsipan berbasis elektronik agar dapat efektif, efisien, baik dan profesional.



2. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional merupakan aplikasi yang digunakan oleh simpul jaringan untuk memasukkan informasi kearsipan



kedalam sistim yang pada akhirnya dapat diakses oleh masyarakat secara nasional melalui Website JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)



3. Karena keterbatasan sumberdaya, kegiatan rapat, koordinasi dan bimtek terkait sosialisasi regulasi dan pengelolaan kearsipan dilaksanakan melalui zoom meeting bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.

4. **Inovasi LAJANG CAKAP**

LAJANG CAKAP merupakan singkatan dari Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka sebagai upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dalam rangka meningkatkan Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat.

Program Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka merupakan pengembangan dari program kunjung perpustakaan yang sudah dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul sebelum tahun 2018. Sebelum tahun 2018, program kunjung perpustakaan dilakukan dengan biaya dan armada secara mandiri dari lembaga yang melakukan kunjungan. Program kunjung Perpustakaan ini juga dilakukan di daerah lain, seperti DPAD Provinsi DIY, Perpusda Sleman, maupun Perpusda Jepara.

Tujuan Inovasi dilengkapi dengan target yang terukur :



- o Menambah jumlah pemustaka
- o Mempermudah pihak sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan terutama untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah pinggiran melalui layanan inovasi LAJANG CAKAP
- o Mensosialisasikan fungsi dan manfaat perpustakaan daerah untuk pelajar dan masyarakat pada umumnya.

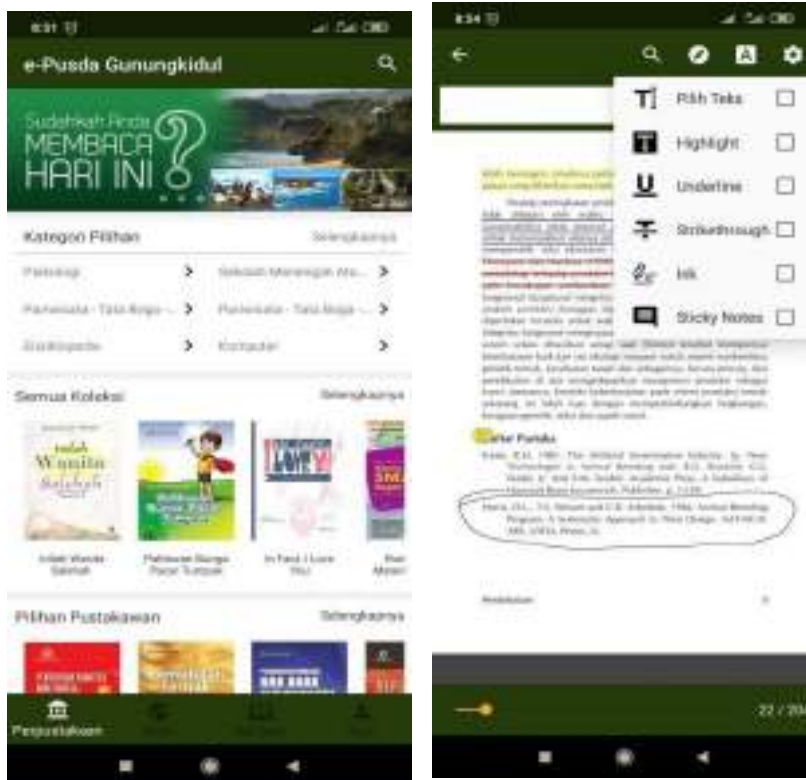
Target capaian pengunjung telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun:

- Tahun 2022 : 86,2871.
- Tahun 2023 : 86,6872.
- Tahun 2024 : 87,1873.
- Tahun 2025 : 87,6874.

Target tahun 2025 sebesar 87,6874 tercapai 110.349 atau 125,84%.

5. Inovasi e-pusda

E-pusda Gunungkidul adalah Perpustakaan digital yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul. Sampai saat ini e-pusda Gunungkidul telah memiliki 1.663 judul dan 2.511 eksemplar buku yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. E-pusda Gunungkidul ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun berada oleh seluruh lapisan masyarakat (pelajar dan masyarakat umum). Selain melalui ponsel pintar Android dan IOS, aplikasi ini juga dapat dibuka melalui PC dan laptop berbasis windows. Tujuan dari layanan ini adalah untuk mendorong minat baca dan mengingatkan pentingnya budaya membaca khususnya di Kabupaten Gunungkidul.



6. Inovasi SAJISAKA

SAJISAKA merupakan akronim dari Satu Jiwa Satu Pustaka. SAJISAKA bukan merupakan kegiatan baru namun memodifikasi kegiatan hibah buku sebelumnya (sebelum 2020), dengan berupaya merekrut donatur-donatur buku baik perorangan maupun lembaga untuk pengumpulan bantuan buku secara masif disertai pelaksanaan sosialisasi, promosi dan publikasi Gerakan Sedekah Buku SAJISAKA (2020-2025) ke lembaga pemerintah, swasta, perorangan yang dikemas dalam satu gerakan serentak untuk menyumbang buku, minimal 1 jiwa membawa 1 buku/pustaka.

Permasalahan koleksi buku yang dialami baik bagi Perpustakaan Daerah maupun perpustakaan binaan (karena koleksi merupakan salah satu unsur pembangun literasi masyarakat), berdasar kondisi jumlah koleksi di perpustakaan tingkat kabupaten maupun perpustakaan binaan, sebagian besar



masih berada di bawah ketentuan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), dan juga karena keterbatasan sumber anggaran khususnya APBD Gunungkidul. Melalui Sedekah Buku SAJISAKA, diharapkan permasalahan koleksi dalam rangka mendukung minat baca tidak melulu menjadi tugas pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, dengan cara melibatkan peran aktif masyarakat melalui gerakan donasi buku yang kita sebut Gerakan SAJISAKA (Satu Jiwa Satu Pustaka), dengan dukungan sarpras kotak buku di tempat-tempat strategis dan di Perpustakaan Gunungkidul.

Gerakan SAJISAKA dimaksudkan untuk:

1. Menggalang donasi buku dari masyarakat, perseorangan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, pegiat literasi/forum komunitas perpustakaan.
2. Melakukan Gerakan Sedekah Buku dengan cara jemput bola, mendatangi langsung pemberi dan penerima hibah, sekaligus sosialisasi program Sedekah Buku SAJI SAKA dan minat baca ke masyarakat.
3. Menggerakkan masyarakat dari semua lini untuk mendukung Gerakan Sedekah Buku, mengupayakan terpenuhinya buku di ruang-ruang publik yang dikelola oleh masyarakat.
4. Menumbuhkan dan membiasakan berbagi buku dalam mendukung terwujudnya minat dan kegemaran membaca masyarakat Gunungkidul.

C. EFISIENSI ANGGARAN

Anggaran belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 2 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp 5.723.233.536,68 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp.5.501.753.962,00 atau 96,13 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.221.479.574.68

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan



disajikan dalam tabel III.16 berikut:

Tabel III.16 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.617.642.036,68	3.431.672.000,00	94,86	185.970.027,68	5,14
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.787.400,00	49.615.854,00	97,69	1.171.546,00	2,31
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.391.027.549,00	2.301.877.612,00	96,27	89.149.937,00	3,73
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.466.000,00	21.770.188,00	88,98	2.695.812,00	11,02
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.231.750,00	174.319.440,00	96,72	5.912.310,00	3,28
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.213.000,00	58.115.000,00	99,83	98.000,00	0,17



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.175.156,00	451.959.892,00	84,61	82.215.264,00	15,39
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.741.181,68	374.014.023,00	98,75	4.727.158,68	1,25
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.448.440.500,00	1.436.319.670,00	99,16	12.120.830,00	0,84
1).	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	627.198.000,00	618.600.545,00	98,63	8.597.455,00	1,37
2).	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	821.242.500,00	817.719.125,00	99,57	3.523.375,00	0,43
3.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	128.953.500,00	125.489.514,00	97,31	3.463.986,00	2,69
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten Kota	128.953.500,00	125.489.514,00	97,31	3.463.986,00	2,69
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	425.532.500,00	405.614.360,00	95,32	19.918.140,00	4,68
1)	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	144.020.000,00	135.516.084,00	34,10	8.503.916,00	5,90
2)	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	197.620.000,00	188.292.355,00	95,28	9.327.645,00	4,72
3)	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	83.892.500,00	81.805.921,00	97,51	2.086.579,00	2,49



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisi ensi (%)
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	102,665,000.00	102,658,409.00	99.99	6,591.00	0,01
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	102,665,000.00	102,658,409.00	99.99	6,591.00	0,01

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan



Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.17 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1.	Kesesuaian Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku"	82,98	82,98	100%	425.532.500,00	405.614.360,00	95,32	19.918.140,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,07	80,70	100,79	3.617.642.036,68	3.431.672.009,00	94,86	185.970.027,68
3	Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat	56,53	14,34	25,37	1.577.394.000,00	1.561.809.184,00	99	15.584.814,00
	Jumlah Belanja Total				5.723.233.536,68	5.501.753.962,00	96,13	221.479.574,68
	Jumlah Belanja Program Utama				2.105.591.500,00	2.070.081.953,00	98,31	35.509.547,00
	Jumlah Belanja Program Penunjang				3.617.642.036,68	3.431.672.009,00	94,86	185.970.027,68

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul sudah mencapai target dan realisasi anggaran dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.5.723.233.536,68 terealisasi Rp.5.501.753.962,00 atau 96.13% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp.221.479.574,68 atau 3,87% yang bersumber dari:

1. Sisa belanja gaji THL
2. Sisa Belanja Perjalanan Dinas
3. Sisa Belanja jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
4. Sisa belanja dengan MBIZ (selisih harga)



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan, 2 (dua) sasaran telah tercapai dengan kategori sangat tinggi. Adapun 1 (satu) sasaran terkait indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan perbedaan hasil capaian sebagai dampak perubahan metodologi pengukuran nasional pada Tahun 2025, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja daerah. Berdasarkan pendekatan perhitungan sebelumnya, capaian pembangunan literasi daerah tetap menunjukkan hasil yang positif dan melampaui target yang ditetapkan



. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.

Pertama, walaupun IKU ada yang tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan kurangnya sarana prasarana di gedung layanan perpustakaan daerah yang baru, dengan kondisi gedung yang representatif dengan jumlah layanan yang banyak dan tingkat kunjungan perpustakaan yang semakin baik, perlu didukung dengan sarana lift sebagai pendukung sarana yang responsif gender bagi penyandang difabel dan kelompok lansia serta kelengkapan lain yang dapat meningkatkan kemanfaatan ruang gedung baru sesuai peruntukannya.

Selain itu perlu adanya peningkatan sinergitas antar Perangkat daerah untuk saling mendukung program mewujudkan “Literasi untuk Kesejahteraan” dan “Arsip sebagai memori kolektif bangsa karena selama ini “Perpustakaan dan Kearsipan” masih dipandang sebelah mata dalam hal pelaksanaan programnya. Padahal program yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul mendukung penguatan birokrasi dan penyiapan SDM unggul di Kabupaten Gunungkidul.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan



pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada pemustaka dalam berbagai layanan yang ada di perpustakaan
2. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui layanan yang ada di perpustakaan
3. Memberikan motivasi kepada Perangkat Daerah dalam meningkatkan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyusun regulasi terkait pengelolaan kearsipan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul
5. Melaksanakan pendampingan pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah sehingga dapat meningkatkan nilai pengawasan kearsipan internal maupun eksternal yang menjadi poin penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Th 2025 beserta perubahannya*
- 2. Evaluasi LKjIP Tahun 2024*
- 3. Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024*
- 4. Piagam Penghargaan*
- 5. Hasil IPLM*



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wilayah Ilmu dan Kearsipan Berdaya Saing

Jalan Kasatrian No 34, Jeruk Kepek, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55812
Telepon. (0274) 394194 Faksimile . (0274) 394194
Posel: dpk@gunungkidulkab.go.id Laman: dpk.gunungkidul.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KISWORO, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025


Pihak Kesatu
KISWORO, S.Pd., M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Karsa, Widyadarmas, Widyakarya

Jalan Kasatrian No 34, Jeruk Kepek, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55812

Telepon. (0274) 394194 Faksimile. (0274) 394194

Posel: dpk@gunungkidulkab.go.id Laman: dpk.gunungkidul.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KISWORO, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025


Pihak Kesatu
KISWORO, S.Pd., M.Pd

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Peningkatan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat Tahun 2026	Indeks	24,1679
2	Terwujudnya Kearsipan yang berkualitas	Tingkat pengelolaan arsip secara baku Tahun 2026	Persen	86,95

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,07
2	Terwujudnya pembangunan literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	23,6038
3	Kesesuaian pengelolaan arsip daerah secara baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	84,78

No	Program		Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.696.232.937,00	APBD
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	1.479.964.500,00	APBD
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp.	129.673.500,00	APBD
4	Program Pengelolaan Arsip	Rp	492.301.500,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	Rp.	172.290.000,00	DANAIS

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

SUNARYANTA

Pihak Kesatu

KISWORO, S.Pd., M.Pd

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Peningkatan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat Tahun 2026	Indeks	24,1679
2	Terwujudnya Kearsipan yang berkualitas	Tingkat pengelolaan arsip secara baku Tahun 2026	Persen	86,95

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,07
2	Terwujudnya pembangunan literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	23,6038
3	Kesesuaian pengelolaan arsip daerah secara baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	84,78

No	Program		Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.696.232.937,00	APBD
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	1.479.964.500,00	APBD
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp.	129.673.500,00	APBD
4	Program Pengelolaan Arsip	Rp	492.301.500,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	Rp.	172.290.000,00	DANAIS


 Pihak Kedua

 NARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025


 Pihak Kesatu

 KISWORO, S.Pd., M.Pd



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

සෞඛ්‍ය විද්‍යා කෘතියෙහි සෞඛ්‍ය

Telefon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SLAMET WINARNO, S.Sos., MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KISWORO, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari erjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu.

V. Wang

SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
NIP. 196804161989031004



KISWORO, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197104271997021002

NIP. 197104271997021002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
विभागा विपुस्तकान् कर्षि कर्षि विभाग

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SLAMET WINARNO, S.Sos., MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KISWORO, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,



KISWORO, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197104271997021002

SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
NIP. 196804161989031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tercapainya pemenuhan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100
1.1	Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah indeks perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	31
1.2	Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Laporan	26
1.3	Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah indeks administrasi kepegawaian	Dokumen	6
1.4	Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah indeks administrasi umum	Dokumen	32
1.5	Tertaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang yang terlaksana	Unit	14
1.6	Tertaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa yang tersusun tepat waktu	Laporan	96
1.7	Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terfasilitasi pemeliharaannya	Unit	170

Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.696.232.937	APBD
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 50.587.400	APBD
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.390.627.549	APBD
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 24.466.000	APBD
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 239.562.750	APBD
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 52.663.000	APBD

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 547.175.156	APBD
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 391.151.082	APBD



Pihak Kedua,

KISWORO, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197104271997021002

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
NIP. 196804161989031004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Wilayah Ilmu, Jantung Kehidupan, Ruang Berkarya

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA MARYANTI, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
NIP. 196804161989031004

Pihak Kesatu

EKA MARYANTI, S.Sos
NIP. 197305091995032002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	6
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	6
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6
4.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	4
5.	Terselenggaranya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	8
6.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	8
7.	Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	300
8.	Terselenggaranya Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	10
9.	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4
10.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
11.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang disediakan	Laporan	72
12.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.	Laporan	12
13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	82
14.	Terselenggaranya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	30
15.	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	31
16.	Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2
17.	Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	25
18.	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Rp	24.466.000,00	APBD
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	9.964.250,00	APBD
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	94.017.000,00	APBD
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	7.604.500,00	APBD
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	12.400.000,00	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	110.127.000,00	APBD
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	5.450.000,00	APBD
8.	Pengadaan Mebel	Rp	30.163.000,00	APBD
9.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	22.500.000,00	APBD
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	56.240.000,00	APBD
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Rp	282.165.556,00	APBD
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	208.769.600,00	APBD
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	273.017.500,00	APBD
14.	Pemeliharaan Mebel	Rp	1.500.000,00	APBD
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	7.500.000,00	APBD
16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	39.635.000,00	APBD
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	69.498.582,00	APBD
18.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	2.615.000,00	APBD

Pihak Kedua



SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
NIP. 196804161989031004

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu



EKA MARYANTI, S.Sos
NIP. 197305091995032002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Nya Maja Karsa Karsa Karsa Karsa

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAMIDAH, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
NIP. 196804161989031004

Pihak Kesatu

KAMIDAH, S.IP
NIP. 196910131989032002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen
4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen
5	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen
6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	17	Laporan
7	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378	Orang
8	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen
9	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tnwulanan/Semesteran	13	Laporan

NO.	Sub Kegiatan	Anggaran	KET
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 9,042,400.00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 30,475,000.00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1,420,000.00	APBD

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	1,420,000.00	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	1,450,000.00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp	1,150,000.00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	4,435,000.00	APBD
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2,319,795,349.00	APBD
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	2,000,000.00	APBD
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	68,832,200.00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
NIP. 196804161989031004

Pihak Kesatu



KAMIDAH. S.IP
NIP.196910131989032002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Silaturahmi Berkeadilan

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADRIANA, S.Sos.MAP
Jabatan : Kepala Bidang Kearsipan
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KISWORO, SPd. MPd.
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Kisworo, SPd. MPd.
NIP. 197104271997021002

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu

Adriana, S.Sos.MAP.
NIP. 197008101992032003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BIDANG KEARSIPAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terselenggaranya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Berkas	1
2	Terselenggaranya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4
3.	Terselenggaranya Kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Arsip	2
4.	Terselenggaranya penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Pengguna	100

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Rp. 5.825.000	APBD
2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 81.365.000	APBD
3.	Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Rp. 218.789.000	APBD
4.	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Rp. 99.942.500	APBD


 Pihak Kedua
 Kisworo, SPd. MPd.
 NIP. 197104271997021002

Wonosari, 6 Januari 2025
 Pihak Kesatu

 Adriana, S.Sos., MAP.
 NIP. 197008101992032003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Ilmu, Amanah Kearsipan, Berkualitas

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENY SURYATI, S.Sos
Jabatan : Tim Kerja Layanan dan Informasi Kearsipan
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ADRIANA, S.Sos, MAP.
Jabatan : Kepala Bidang Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Adriana, S.Sos., MAP.
NIP. 197008101992032003

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu

Eny Suryati, S.Sos
NIP. 196912241990032005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TIM KERJA LAYANAN DAN INFORMASI KEARSIPAN BIDANG KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Pengguna	100

1 Sub Kegiatan
 Penyediaan informasi, akses
 dan layanan kearsipan tingkat
 daerah kabupaten/kota
 melalui JIKN

Anggaran
 Rp. 99.942.500,-

Keterangan
 APBD

Pihak Kedua



Adriana, S.Sos. MAP.
 NIP. 197008101992032003

Wonosari, 6 Januari 2025
 Pihak Kesatu



Eny Suryati, S.Sos
 NIP. 196912241990032005



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Silaturahmi Berkeadilan

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVITA ROHMAWATI, A.Md.

Jabatan : Tim Kerja Arsip Dinamis

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ADRIANA, S.Sos,MAP.

Jabatan : Kepala Bidang Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Adriana, S.Sos.,MAP.
NIP. 197008101992032003

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu

Novita Rohmawati, A.Md.
NIP. 197711132009022001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TIM KERJA ARSIP DINAMIS BIDANG KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terselenggaranya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Berkas	1
2	Terselenggaranya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Rp. 5.825.000	APBD
2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 81.365.000	APBD

Pihak Kedua



Adriana, S.Sos.,MAP.
NIP. 197008101992032003

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu



Novita Rohmawati, A.Md.
NIP. 197711132009022001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Silaturahmi Berkualitas

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVITA ROHMAWATI, A.Md.

Jabatan : Tim Kerja Arsip Dinamis

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ADRIANA, S.Sos,MAP.

Jabatan : Kepala Bidang Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Adriana, S.Sos.,MAP.
NIP. 197008101992032003

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu

Novita Rohmawati, A.Md.
NIP. 197711132009022001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TIM KERJA ARSIP DINAMIS BIDANG KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terselenggaranya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Berkas	1
2	Terselenggaranya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Rp. 5.825.000	APBD
2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 81.365.000	APBD

Pihak Kedua



Adriana, S.Sos.,MAP.
NIP. 197008101992032003

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu



Novita Rohmawati, A.Md.
NIP. 197711132009022001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Ilmu, Wawasan Kebangsaan, Kearifan Lokal

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFAN HIDAYAT, S.IP, MAP

Jabatan : Tim Kerja Arsip Statis

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ADRIANA, S.Sos,MAP.

Jabatan : Kepala Bidang Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Adriana, S.Sos.,MAP.
NIP. 197008101992032003

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu

Taufan Hidayat, S.IP, MAP
NIP. 198105092006041006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TIM KERJA ARSIP STATIS BIDANG KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terselenggaranya Kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Arsip	2

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Rp. 218.789.000	APBD

Pihak Kedua



Adriana, S.Sos., MAP.
NIP. 197008101992032003

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu



Taufan Hidayat, S.IP, MAP
NIP. 198105092006041006



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

विभागा विपुस्तकान् आन्तरिकी आन्तरिकी

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Poseldpk@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERYANTI, S.Pd.**

Jabatan : Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **ARIF YAHYA, S.STP., MAP**

Jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARIF YAHYA, S.STP., MAP
Pembina, IV/a
NIP. 197608051997011001

Wonosari, 3 Februari 2025
Pihak Kesatu

HERYANTI, S.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197901221998022001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

No.	SasaranSub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	10
2	Terwujudnya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Perpustakaan	8
3	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	2
4	Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi padaSatuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	84
5	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	5
6	Terwujudnya Pengembangan keKhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Eksemplar	110

Sub Kegiatan		Anggaran		Ket
1.	Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Rp	58.329.000,00	APBD
2.	Pengenbangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp	98.659.800,00	APBD
3.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Rp	12.226.400,00	APBD
4.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Rp	192.448.700,00	DAK-NF dan APBD
5.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Rp	498.474.000,00	DAK-NF dan APBD
6.	Pengembangan keKhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Rp	189.100.000,00	DAK-NF
Jumlah		Rp	1.049.237.900.00	

Pihak Kedua,



ARIF YAHYA, S.STP., MAP
Pembina, IV/a
NIP. 197608051997011001

Wonosari, 3 Februari 2025
Pihak Kesatu



HERYANTI, S.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197901221998022001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Widyadarmas

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55613
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Poseldpk@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CHRISFANTI YULIANA, S.Sos**

Jabatan : Ketua Tim Kerja Seksi Layanan dan Informasi Perpustakaan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **ARIF YAHYA, S.STP., MAP**

Jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARIF YAHYA, S.STP., MAP
Pembina, IV/a
NIP. 197608051997011001

Wonosari, 3 Februari 2025
Pihak Kesatu

CHRISFANTI YULIANA, S.Sos
Penata Tingkat I, III/d
NIP 197807231998032004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Ketua Tim Kerja Seksi Layanan dan Informasi Perpustakaan

No.	SasaranSub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya sosialisasi dan monev epusdagunungkidul ke sekolah-sekolah dan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1
2	Terlaksananya layanan perpustakaan keliling untuk masyarakat pinggiran Dan Terlaksananya layanan kunjungan perpustakaan dari sekolah	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Layanan	2
3	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk layanan perpustakaan keliling	Jumlah sarana perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1
4	Terlaksananya bimbingan pemustaka dalam bentuk pendidikan pemustaka pada kegiatan LAJANG CAKAP	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen	1

No.	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Rp	15.990.000,00	APBD dan DAK-NF
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp	153.034.700,00	APBD
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	35.590.000,00	DAK-NF
4	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp	172.290.000,00	DANAIS
Jumlah			376.904.700,00	

Pihak Kedua,



ARIF YAHYA, S.STP., MAP
Pembina, IV/a
NIP. 197608051997011001

Wonosari, 3 Februari 2025
Pihak Kesatu



CHRISFANTI YULIANA, S.Sos
Penata Tingkat I, III/d
NIP 197803231998032004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

विभागा विपुस्तकान् आर्काइव् आर्काइव्

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Poseldpk@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PRI HASTUTI SETIANINGSIH, S.Sos**

Jabatan : **Ketua Tim Kerja Pengadaan, Pengolahan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **ARIF YAHYA, S.STP., MAP**

Jabatan : **Kepala Bidang Perpustakaan**

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARIF YAHYA, S.STP., MAP
Pembina, IV/a
NIP. 197608051997011001

Wonosari, 3 Februari 2025
Pihak Kesatu

PRI HASTUTI SETIANINGSIH, S.Sos
Penata Tingkat I, III/d
NIP 197109141999032006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Ketua Tim Kerja Pengadaan, Pengolahan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

No.	SasaranSub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya pengembangan koleksi perpustakaan berciri khas Daerah Gunungkidul	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Eksemplar	150
2	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan keberagaman koleksi	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan	Eksemplar	2522
3	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Pendataan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	1
4	Terlaksananya Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Naskah Kuno	Dokumen	1
		Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan dan perawatan naskah kuno	Orang	3
5	Terselenggaranya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan, Dilestarikan dan Didayagunakan	Naskah	3

	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
1	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Rp	15.999.900,00	APBD GK
2	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Rp	136.835.000,00	APBD GK
3	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Rp	33.326.500,00	DAK-NF
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Rp	116.673.500,00	DAK-NF
5	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Rp	13.000.000,00	APBD GK
Jumlah			315,834,900.00	

Pihak Kedua,



ARIF YAHYA, S.STP., MAP
Pembina, IV/a
NIP. 197608051997011001

Wonosari, 3 Februari 2025
Pihak Kesatu



PRI HASTUTI SETIANINGSIH, S.Sos
Penata Tingkat I, III/d
NIP 197109141999032006



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wakil Bupati Gunungkidul

Jalan Kasatrian No 34, Jeruk Kepek, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55812

Telepon. (0274) 394194 Faksimile . (0274) 394194

Posel: dpk@gunungkidulkab.go.id Laman: dpk.gunungkidul.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KISWORO, S.Pd., M.Pd

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P.

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,

KISWORO, S.Pd., M.Pd

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Peningkatan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat Tahun 2025	Indeks	56,53
2	Terwujudnya Kearsipan yang berkualitas	Tingkat pengelolaan arsip secara baku Tahun 2025	Persen	82,98

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,07
2	Terwujudnya pembangunan literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	56,53
3	Kesesuaian pengelolaan arsip daerah secara baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	82,98

No	Program	Anggaran Setelah perubahan		Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.617.642.036,68	APBD
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	1.448.440.500,00	APBD/DAK
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp.	128.953.500,00	APBD
4	Program Pengelolaan Arsip	Rp	425.532.500,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	Rp.	102.665.000,00	DANAIS

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua



↑
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu



KUSWORO, S.Pd., M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Ilmu Pengetahuan dan Kearsipan

Jalan Kasatrian No 34, Jeruk Kepek, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55812

Telepon. (0274) 394194 Faksimile. (0274) 394194

Posel: dpk@gunungkidulkab.go.id Laman: dpk.gunungkidul.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDI ISMANTO, A.MK, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KISWORO, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



KISWORO, S.Pd., M.Pd
NIP.197104271997021002

Wonosari, 03 November 2025
Pihak Kesatu,

RUDI ISMANTO, A.MK, SE, MM
NIP. 197104201994021002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapainya pemenuhan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	32
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan	26
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	6
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	24
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan	3
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terfasilitasi pemeliharanya	Unit	219

No	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp. 717.471.983,68	APBD-P
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 13.273.320,00	APBD-P
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 420.522.360,00	APBD-P
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 5.853.339,00	APBD-P
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 22.724.265,00	APBD-P
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 98.000,00	APBD-P
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 178.223.916,00	APBD-P
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 76.776.783,68	APBD-P

Wonosari, 03 November 2025



Pihak Kedua,

KISWORO, S.Pd., M.Pd
NIP.197104271997021002

Pihak Kesatu,

RUDI ISMANTO, A.MK., SE., MM
NIP. 197104201994021002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Ilmu, Jujur, Berprestasi, Berkeadilan

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA MARYANTI, S.Sos.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
NIP. 196804161989031004

Pihak Kesatu

EKA MARYANTI, S.Sos.
NIP. 197305091995032002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
2.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang di sediakan	Laporan	72
3.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.	Laporan	12
4.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	82
5.	Terselenggaranya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	30
6.	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	31
7.	Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2
8.	Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	45
9.	Terselenggaranya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	6
10.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	6
11.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6
12.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4
13.	Terselenggaranya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	8
14.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	8
15.	Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	300
16.	Terselenggaranya Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	10
17.	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4
18.	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4

NO.	Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN	KET
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	24.466.000,00	APBD
1.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	24.466.000,00	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	180.231.750,00	APBD
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	9.964.250,00	APBD
2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	93.537.000,00	APBD
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	7.439.500,00	APBD
2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	13.450.000,00	APBD
2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	50.691.000,00	APBD
2.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	5.150.000,00	APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	58.213.000,00	APBD
3.1	Pengadaan Mebel	Rp	30.163.000,00	APBD
3.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	28.050.000,00	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	534.175.156,00	APBD
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	42.840.000,00	APBD
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Rp	282.165.556,00	APBD
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	209.169.600,00	APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	378.741.181,00	APBD
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	241.107.600,00	APBD
5.2	Pemeliharaan Mebel	Rp	1.500.000,00	APBD
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	13.500.000,00	APBD

5.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	27.235.000,00	APBD
5.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	95.398.581,68	APBD
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	50.587.400,00	APBD
6.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	2.615.000,00	APBD

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua



SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
NIP. 196804161989031004

Pihak Kesatu



EKA MARYANTI, S.Sos.
NIP. 197305091995032002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Silaturahmi Berprestasi

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAMIDAH, S.IP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SLAMET WINARNO, S.Sos., MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,



Pihak Kesatu,

KAMIDAH, S.IP
NIP.196910131989032002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

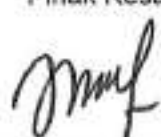
No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen
2	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen
3	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen
4	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen
5	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen
6	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	17	Laporan
7	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	376	Orang
8	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen
9	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	13	Laporan

NO.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	KET
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.787.400,00	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 9.042.400,00	APBD
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 30.675.000,00	APBD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.420.000,00	APBD
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1.450.000,00	APBD
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 1.150.000,00	APBD
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 4.435.000,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.391.027.549,00	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.319.795.349,00	APBD
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.000.000,00	APBD
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 69.232.200,00	APBD


 Pihak Kedua,

 SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
 NIP. 196804161989031004

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

 KAMIDAH. S.IP
 NIP.196910131989032002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Ilmu, Wawasan Kearif, Aksi Bermartabat

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Lamandpk.gunungkidulkab.go.id; Poseldpk@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHRISFANTI YULIANA, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KISWORO, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

KISWORO, S.Pd, M.Pd
NIP. 197104271997021002

Wonosari, 3 November 2025

Pihak Kesatu,


CHRISFANTI YULIANA, S.Sos
NIP. 197807231998032004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapainya pembinaan Perpustakaan	Persentase tercapainya Program Pembinaan Perpustakaan	Persen	100
1.1	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	6
1.2	Terlaksananya Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	5
2	Tercapainya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Capaian Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persen	100
2.1	Terlaksananya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	2
3	Tercapainya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persen	100
3.1	Terlaksananya Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kegiatan	1

Program/Kegiatan		Anggaran	Ket
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 91.417.500,00	
1.1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 84.669.314,00	APBD-P dan DAK NF
1.2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.748.276,00	APBD-P dan DAK NF
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 13.003.986,00	
2.2	Kegiatan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.003.986,00	APBD-P dan DAK NF
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 10.805.671,00	
3.1	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Rp 10.805.671,00	DANAIS

Pihak Kedua,



KISWORO, S.Pd, M.Pd
NIP. 197104271997021002

Wonosari, 3 November 2025
Pihak Kesatu



CHRISFANTI YULIANA, S.Sos
NIP. 197807231998032004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Lamandpk.gunungkidulkab.go.id; Poseldpk@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG WIBAWA, S.IP

Jabatan : Ketua Tim Kerja Layanan Informasi Perpustakaan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : CHRISFANTI YULIANA, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 03 November 2025

Pihak Kedua,

CHRISFANTI YULIANA, S.Sos
NIP. 197807231998032004

Pihak Kesatu,

AGUNG WIBAWA, S.IP
NIP. 197207151998031009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TIM KERJA LAYANAN DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN
(DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Layanan	2
2	Terwujudnya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1
3	Terwujudnya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen	4
4	Terwujudnya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1

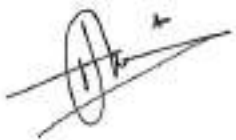
Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 21,767,660,00	APBD
2. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Rp 39,00	APBD dan DAK NF
3. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 0,00	DAK NF
4. Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp 10.805.671,00	DANAIS

Wonosari, 03 November 2025

Pihak Kedua,


CHRISFANTI YULIANA, S.Sos
NIP. 197807231998032004

Pihak Kesatu,


AGUNG WIBAWA, S.IP
NIP. 197207151998031009



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦑꦸꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦼꦫꦸꦥꦏꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦸꦥꦸꦠꦏꦁꦏꦼꦫꦸꦥꦏꦤ꧀

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Lamandpk.gunungkidulkab.go.id; Poseldpk@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRI HASTUTI SETIANINGSIH, S.Sos

Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARIF YAHYA, S.STP., MAP.

Jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

ARIF YAHYA, S.STP., MAP.
NIP. 197608051997011001

Pihak Kesatu,

PRI HASTUTI SETIANINGSIH, S.Sos
NIP. 19710914 199903 2 006

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Ketua Tim Kerja Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten	Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten	Persen	100
1.1	Terlaksananya penyusunan data dan informasi perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1
1.2	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan bahan perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	2522
1.3	Terlaksananya pengembangan koleksi kekhasan Gunungkidul	Jumlah koleksi Perpustakaan Khas Daerah Kabupaten	Eksemplar	150
2	Terlaksananya pelestarian koleksi naskah kuno milik daerah kabupaten	Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan pelestarian koleksi naskah kuno milik daerah kabupaten	Persen	100
2.1	Terlaksananya peran serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	820
2.2	Terlaksananya pengembangan, pengolahan, dan pengalihmediaan naskah kuno milik masyarakat untuk dilestarian dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarian dan didayagunakan	Eksemplar	3

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Rp 33.300.400,00	DAK Non Fisik
2	Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Rp 136.065.000,00	APBD-P Kabupaten Gunungkidul
3	Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 15.800.000,00	APBD-P Kabupaten Gunungkidul

- 4 **Kegiatan :**
Pelestarian Koleksi Naskah Kuno Milik Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Peningatan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran
Naskah Kuno
- 5 **Kegiatan :**
Pelestarian Koleksi Naskah Kuno Milik Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Pengembangan, Pengolahan, dan Pengalihmediaan
Naskah Kuno Yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk
Dilestarikan dan Didayagunakan
- Rp 116.673.500,00 DAK Non Fisik
- Rp 12.280.000,00 APBD-P Kabupaten Gunungkidul

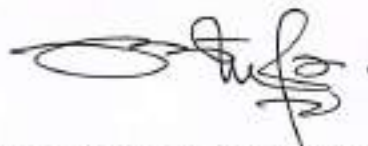
Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,



ARIF YAHYA, S.STP., MAP.
NIP. 197608051997011001

Pihak Kesatu,



PRI HASTUTI SETIANINGSIH, S.Sos
NIP. 19710914 199903 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

विभागा विपुस्तकाना के आर्किव के आर्किव

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Poseldpk@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERYANTI, S.Pd.**

Jabatan : Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **ARIF YAHYA, S.STP., MAP**

Jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARIF YAHYA, S.STP., MAP
NIP. 197608051997011001

Wonosari, September 2025
Pihak Kesatu

HERYANTI, S.Pd.
NIP 197901221998022001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

No.	SasaranSub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	10
2	Terwujudnya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Perpustakaan	8
3	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	2
4	Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi padaSatuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	84
5	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	5
6	Terwujudnya Pengembangan keKhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Eksemplar	110

	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
1.	Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Rp	52.199.000,00	APBD
2.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp	94.729.800,00	APBD
3.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Rp	10.346.400,00	APBD
4.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Rp	186.983.700,00	DAK-NF dan APBD
5.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Rp	503.939.000,00	DAK-NF dan APBD
6.	Pengembangan keKhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Rp	229.077.000,00	DAK-NF
	Jumlah	Rp	1.077.274.900.00	

Pihak Kedua,



ARIF YAHYA, S.STP., MAP
NIP. 197608051997011001

Wonosari, September 2025
Pihak Kesatu



HERYANTI, S.Pd.
NIP 197901221998022001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Widhi Widya Widhika Widhi Widhika

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADRIANA, S.Sos.MAP

Jabatan : Kepala Bidang Kearsipan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KISWORO, SPd. MPd.

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu

Adriana, S.Sos..MAP.

NIP. 197008101992032003

Pihak Kedua



Kisworo, SPd. MPd.

NIP. 197104271997021002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BIDANG KEARSIPAN
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pemeliharaan/penyusutan dan pengawasan kearsipan	laporan	4
2	Pengelolaan Arsip statis daerah Kabupaten/kota	Jumlah kegiatan arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Laporan	4
3.	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat Kabupaten/kota	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah/kota melalui JIKN	pengguna	100

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Rp. 144.020.000	APBD
2	Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Rp. 197.620.000	APBD
3.	Layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah/kota melalui JIKN	Rp. 83.892.500	APBD

Wonosari, 4 September 2025
 Pihak Kedua



Kisword, SPd. MPd.
 NIP. 197104271997021002

Adriana, S.Sos., MAP.
 NIP. 197008101992032003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Silaturahmi Berkeadilan

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVITA ROHMAWATI, A.Md.

Jabatan : Tim Kerja Arsip Dinamis

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ADRIANA, S.Sos,MAP.

Jabatan : Kepala Bidang Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Adriana, S.Sos, MAP.
NIP. 197008101992032003

Wonosari, 4 September 2025
Pihak Kesatu

Novita Rohmawati, A.Md.
NIP. 197711132009022001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TIM KERJA ARSIP DINAMIS BIDANG KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terselenggaranya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Berkas	1
2	Terselenggaranya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Rp. 5.825.000	APBD
2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 138.195.000	APBD

Pihak Kedua



Adriana, S.Sos., MAP.
NIP. 197008101992032003

Wonosari, 4 September 2025
Pihak Kesatu



Novita Rohmawati, A.Md.
NIP. 197711132009022001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFAN HIDAYAT, S.IP.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Arsip Statis

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ADRIANA, S.Sos., MAP

Jabatan : Kepala Bidang Kearsipan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,



ADRIANA, S.Sos., MAP

Pihak Kesatu,



TAUFAN HIDAYAT, S.IP.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Ketua Tim Kerja Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Arsip	2

	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Rp. 226.460,00	APBDP

Pihak Kedua,



ADRIANA, S.Sos., MAP

Pihak Kesatu,



TAUFAN HIDAYAT, S.IP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Pustaka dan Kearsipan Gunungkidul

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENY SURYATI, S.Sos
Jabatan : Tim Kerja Layanan dan Informasi Kearsipan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ADRIANA, S.Sos, MAP.
Jabatan : Kepala Bidang Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Adriana, S.Sos, MAP.
NIP. 197008101992032003

Wonosari, 4 September 2025
Pihak Kesatu

Eny Suryati, S.Sos
NIP. 196912241990032005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TIM KERJA LAYANAN DAN INFORMASI KEARSIPAN BIDANG KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Pengguna	100

- 1 Sub Kegiatan
Penyediaan informasi, akses
dan layanan kearsipan tingkat
daerah kabupaten/kota
melalui JIKN

Anggaran
Rp. 83.892.500,-

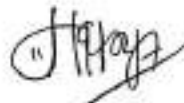
Keterangan
APBD

Pihak Kedua



Adriana, S.Sos.,MAP.
NIP. 197008101992032003

Wonosari, 4 September 2025
Pihak Kesatu



Eny Suryati, S.Sos
NIP. 196912241990032005



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦠꦤꦶꦥꦠꦺꦴꦩꦶꦠ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 26 Maret 2025

Nomor : 300.1.2.7 / EV - LKj / 26
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Internal pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Gunungkidul Tahun
2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

7. **Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**
Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring nomor 700.1.2.7/SKIP/15 tanggal 16 Juli 2024 dan dokumen yang dilampirkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa nilai sebesar "80,70" dengan predikat "A" Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja " Memuaskan" yaitu Terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,97	24,99
2. Pengukuran Kinerja	30	24,27	23,79
3. Pelaporan Kinerja	15	12,94	11,08
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	20,85
Nilai Hasil Evaluasi	100	83,03	80,70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Target yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja menantang, namun kurang *achievable* dan *realistic*.
- b. Target yang ditetapkan tidak dapat tercapai secara optimal, karena target yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja menantang, namun kurang *achievable* *realistic*.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Pimpinan unit kerja belum terlibat dalam pemantauan di seluruh proses pengukuran kinerja yang harus dicapai sesuai yang diperjanjikan.
- b. Data yang dikumpulkan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan belum seluruhnya dilakukan, diantaranya dokumen target yang diperbandingkan belum menggunakan target terakhir yang ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja, sehingga perhitungan capaian kinerja menjadi salah saji.
- c. Pengumpulan data kinerja belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja.

- d. Verifikasi dan penelusuran yang dilakukan berjenjang atas pengukuran capaian kinerja sampai ke sumber data sebagai alat control dalam pelaksanaan validasi secara berjenjang belum dilaksanakan.
- e. Hasil pengukuran kinerja belum seluruhnya menjadi dasar perubahan / penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja.
- f. Belum seluruh unit memahami dan peduli pada hasil pengukuran kinerja.
- g. Belum seluruh pegawai memahami dan peduli pada hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Dokumen laporan kinerja belum menguraikan perubahan target kinerja sebagai pembanding dalam perhitungan capaian kinerja.
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang terakhir ditetapkan.
- c. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya secara valid.
- d. Dokumen Laporan Kinerja salah saji dalam menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- e. Laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian dan kepedulian oleh seluruh jenjang organisasi.
- f. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- g. Penyesuaian Aktivitas pada Organisasi belum sepenuhnya didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis

- h. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- i. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- j. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- k. Informasi dalam laporan kinerja belum seluruhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal antara lain sebagai berikut:

LHE belum dimanfaatkan sebagai dasar perubahan kebijakan/kegiatan/anggaran

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Agar dalam penentuan target kinerja pada periode perencanaan yang akan datang berdasarkan analisis yang memadai, sehingga lebih achievable, menantang dan realistis.
- b. Agar dalam penentuan target kinerja pada periode perencanaan yang akan datang berdasarkan analisis yang memadai, sehingga lebih achievable, menantang dan realistis.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Pimpinan unit kerja agar meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam memantau seluruh proses pengukuran kinerja yang harus dicapai sesuai yang diperjanjikan kinerja yang telah ditetapkan.

- b. Agar pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan data dokumen yang valid dan benar secara jelas dan memadai untuk perhitungan capaian target yang ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja, sehingga perhitungan capaian kinerja menjadi tepat dan benar.
- c. Agar pengumpulan data kinerja dapat mendukung capaian kinerja berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja pada pelaporan yang akan datang.
- d. Agar setiap jenjang melakukan verifikasi dan penelusuran sampai ke sumber data, atas pengukuran capaian kinerja, sebagai quality control dalam pelaksanaan validasi.
- e. Melakukan pengukuran kinerja secara tepat, sebagai alat untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
- f. Agar setiap unit memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
- g. Membentuk forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang sampai dengan tataran individu dalam rangka pengukuran kinerja, agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat, sehingga penyajian Capaian Kinerja dilakukan secara tepat.
- b. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat, sehingga penyajian Capaian Kinerja dilakukan secara tepat.
- c. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat, sehingga penyajian Capaian Kinerja dilakukan secara tepat dan berkualitas.
- d. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat, sehingga penyajian Capaian Kinerja dilakukan secara tepat dan berkualitas.
- e. Agar laporan kinerja menjadi perhatian utama dan kepedulian oleh pimpinan unit.

- f. Agar laporan kinerja menjadi perhatian dan kepedulian oleh seluruh jenjang organisasi.
- g. Agar Laporan Kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian dan evaluasi untuk perbaikan aktivitas untuk mencapai kinerja.
- h. Agar Laporan Kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian dan evaluasi untuk penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- i. Agar laporan kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- j. Agar Laporan Kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- k. Agar Laporan Kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian dan evaluasi untuk perbaikan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sebelum dimanfaatkan sebagai dasar perubahan kebijakan/kegiatan/anggaran.

D. PENUTUP

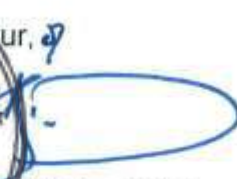
1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

Inspektur, 

Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wahana Ilmu dan Kearsipan

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 4 Juni 2025

Nomor : B/700.1.2.7/150/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut AKIP Tahun 2024

Yth. Inspektur Kabupaten Gunungkidul
di
Gunungkidul

Dalam rangka menindaklanjuti surat Saudara Nomor 700.1.2.7/EV-LKJIP/26 tanggal 26 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, maka dengan ini kami kirimkan rencana tindak lanjut dari surat tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan,



Kisworo, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197104271997021002

Tembusan :
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

NO	KONDISI/CATATAN	REKOMENDASI	KONFIRMASI TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA	1. Agar dalam penentuan target kinerja pada periode perencanaan yang akan datang berdasarkan analisis yang memadai, sehingga lebih achievable, menantang dan realistis	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		2. Agar dalam penentuan target kinerja pada periode perencanaan yang akan datang berdasarkan analisis yang memadai, sehingga lebih achievable, menantang dan realistis	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
2	PENGUKURAN KINERJA	1. Pimpinan unit kerja meningkatkan pemahaman dan ketertiban dalam mamantau seluruh proses pengukuran kinerja yang harus dicapai sesuai yang diperjanjikan kinerja yang telah ditetapkan.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
	-	2. Agar pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumen yang valid dan benar secara jelas dan memadai untuk perhitungan capaian target yang ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja sehingga perhitungan capaian kinerja menjadi tepat dan benar.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		3. Agar pengumpulan data kinerja dapat mendukung capaian kinerja berdasarkan perubahan perjanjian kinerja pelaporan yang akan datang.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		4. Agar setiap jenjang melakukan verifikasi dan penelusuran sampai sampai ke sumber data atas pengukuran capaian kinerja, sebagai quality control dalam pelaksanaan validasi.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

NO	KONDISI/CATATAN	REKOMENDASI	KONFIRMASI TINDAK LANJUT
		5. Melakukan pengukuran kinerja secara tepat, sebagai alat untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		6. Agar setiap unit memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja .	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		7. Membentuk forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang sampai dengan tataran individu dalam rangka pengukuran kinerja agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
3	PELAPORAN KINERJA	1. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat sehingga penyajian kinerja dilakukan secara tepat.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		2. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat sehingga penyajian kinerja dilakukan secara tepat.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		3. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat sehingga penyajian capaian kinerja dilakukan secara tepat dan berkualitas.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		4. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat sehingga penyajian capaian kinerja dilakukan secara tepat dan berkualitas.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		5. Agar laporan capaian kinerja menjadi perhatian utama dan kepedulian oleh pimpinan unit.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		6. Agar laporan capaian kinerja menjadi perhatian utama dan kepedulian oleh seluruh jenjang organisasi	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		7. Agar laporan capaian kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian dan evaluasi untuk perbaikan aktivitas untuk mencapai kinerja	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

NO	KONDISI/CATATAN	REKOMENDASI	KONFIRMASI TINDAK LANJUT
		8. Agar laporan capaian kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian dan evaluasi untuk penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		9. Agar laporan capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		10. Agar laporan capaian kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
		11. Agar laporan capaian kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian dan evaluasi untuk perbaikan budaya kinerja organisasi.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar perubahan kebijakan/kegiatan/anggaran	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,



Kisworo, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197104271997021002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦱꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦱꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 700.1.1.3/6/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET WINARNO, S.Sos., MM

NIP : 196804161989031004

Jabatan : Plh. Kepala Dinas

Menyatakan bahwa sanggup dalam hal pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumen yang valid dan benar secara jelas dan memadai untuk perhitungan capaian target yang ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja, sehingga perhitungan capaian kinerja menjadi tepat dan benar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 1 Juli 2025

Hormat Saya,



Slamet Winarno, S.Sos., MM

NIP. 196804161989031004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦱꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦱꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 700.1.1.3/8/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET WINARNO, S.Sos., MM
NIP : 196804161989031004
Jabatan : Plh. Kepala Dinas

Menyatakan bahwa sanggup setiap jenjang melakukan verifikasi dan penelusuran sampai ke sumber data, atas pengukuran capaian kinerja, sebagai *quality control* dalam pelaksanaan validasi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 1 Juli 2025

Hormat Saya,



Slamet Winarno, S.Sos., MM
NIP. 196804161989031004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦏꦶꦱꦮꦺꦴꦫꦺꦴꦱꦠꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦶꦱꦮꦺꦴꦫꦺꦴꦱꦠꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 700-1-2-7/013/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KISWORD,S.Pd., M.Pd.

NIP : 197104271997021002

Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan bahwa sanggup melakukan pengukuran kinerja secara tepat , sebagai alat untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai tujuan kinerja.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 27 Agustus 2025

Kepala Dinas,

KISWORD, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197104271997021002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦏꦶꦱꦮꦺꦴꦫꦺꦴꦱꦠꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦶꦱꦮꦺꦴꦫꦺꦴꦱꦠꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 700-1.2.7/72/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KISWORO, S.Pd., M.Pd.

NIP : 197104271997021002

Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan bahwa sanggup menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat sehingga penyajian Capaian Kinerja dilakukan secara tepat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 27 Agustus 2025

Kepala Dinas,

KISWORO, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197104271997021002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦫꦸꦱꦠꦏꦁꦏꦧꦸꦭ
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦫꦸꦱꦠꦏꦁꦏꦧꦸꦭ

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 700-1.2.7/071/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KISWORO, S.Pd., M.Pd.

NIP : 197104271997021002

Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan bahwa sanggup menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat sehingga penyajian Capaian Kinerja dilakukan secara tepat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, ...27. Agustus 2025

Kepala Dinas,



KISWORO, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 197104271997021002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦼꦫꦸꦱꦠꦏꦏꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦏꦼꦫꦱꦶꦥꦤ꧀

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 700.1.2.7/066/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KISWORO, S.Pd., M.Pd.

NIP : 197104271997021002

Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan bahwa sanggup menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat sehingga penyajian Capaian Kinerja dilakukan secara tepat dan berkualitas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 27 Agustus 2025

Kepala Dinas,

KISWORO, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197104271997021002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3-4
ꦱꦶꦩꦤꦶꦏꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦱꦶꦩꦤꦶꦏꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 700-1-2.7/067/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KISWORO,S.Pd., M.Pd.

NIP : 197104271997021002

Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan bahwa sanggup menyusun laporan kinerja dengan menyajikan data yang valid dan informasi yang tepat sehingga penyajian Capaian Kinerja dilakukan secara tepat dan berkualitas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 27 Agustus 2025

Kepala Dinas



KISWORO, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 197104271997021002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦼꦫꦸꦱꦠꦏꦤꦤꦏꦼꦫꦱꦶꦥꦤ꧀

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 700-1-2.7/068/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KISWORO,S.Pd., M.Pd.

NIP : 197104271997021002

Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan bahwa sanggup untuk meningkatkan perhatian, pencermatan dan kepedulian pimpinan dan jajarannya dalam penyusunan laporan kinerja pada periode pelaporan selanjutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 27 Agustus 2025

Kepala Dinas,

KISWORO, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 197104271997021002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦏꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦸꦥꦸꦠꦱꦠꦏꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦏꦼꦂꦱꦶꦥꦤ꧀

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194
Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 700-1-2-7/060/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KISWORO,S.Pd., M.Pd.

NIP : 197104271997021002

Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan bahwa sanggup untuk menggunakan Laporan Kinerja sebagai dasar penyesuaian dan evaluasi untuk perbaikan aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian dan evaluasi untuk penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, perbaikan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dasar untuk perbaikan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan dasar penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dan dasar penyesuaian dan evaluasi untuk perbaikan budaya kinerja organisasi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, Agustus 2025

Kepala Dinas

KISWORO, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197104271997021002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦧꦶꦏꦤꦤꦶꦥꦸꦱꦠꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦫꦸꦱꦠꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394194; Faksimile (0274) 394194

Laman dpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpk@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 700.1.2.7/070/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KISWORO,S.Pd., M.Pd.

NIP : 197104271997021002

Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan bahwa sanggup untuk memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai dasar perencanaan perubahan kebijakan/kegiatan/anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 27 Agustus 2025

Kepala Dinas,



KISWORO, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197104271997021002

PENGHARGAAN TAHUN 2025

1. Penghargaan dari Marksplus Institute Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul atas pelayanan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025



2. Penghargaan dari Perpustakaan Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu best practice atau Pengalaman Terbaik.



3. Penghargaan dari Bupati Gunungkidul Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Peringkat I kategori Badan/Dinas dalam pengawasan kearsipan Internal tahun 2025.



Nomor : B.844/4/APB.00.02/II.2026
Sifat : Biasa
Lamp. : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025

Jakarta, 20 Februari 2026

Yth. : **1. Gubernur**
2. Bupati/Walikota
di Seluruh Indonesia

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah menyelesaikan pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2025 yang merupakan bagian dari laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah urusan perpustakaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil pengukuran IPLM dan TKM dari masa sanggah seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hasil pengukuran, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Instrumen dan Tata Cara Perhitungan IPLM dan TKM

IPLM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen.

TKM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca 35 persen.

Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan.

2. Penegasan Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Kewenangan

Pengukuran IPLM saat ini didasarkan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pengukuran berdasarkan kewilayahan. Dengan demikian, nilai yang dihasilkan saat ini tidak lagi nilai agregat yang dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin

keadilan pengukuran serta kesesuaian dengan kerangka desentralisasi pemerintahan dan nilai IPLM saat ini tidak dapat dibandingkan antar wilayah.

3. Integritas Pengukuran

Nilai yang dihasilkan dalam pengukuran ini sepenuhnya berbasis pada data yang dikirimkan dan diverifikasi oleh daerah. Data tersebut merefleksikan kondisi faktual yang terjadi di lapangan dan menjadi cermin objektif bagi kita semua. Kami memandang bahwa hasil ini bukan untuk menilai, melainkan untuk memetakan secara jujur kondisi pembangunan literasi saat ini. Dengan pemetaan yang lebih presisi, intervensi kebijakan dapat diarahkan pada dimensi dan indikator yang benar-benar membutuhkan penguatan.

Hasil kajian ini merupakan potret awal dari kondisi literasi di setiap daerah yang sekiranya dapat ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan kerangka kebijakan, program, anggaran, dan regulasi yang berpihak pada pembangunan urusan perpustakaan dan literasi di daerah.

Koordinasi lebih lanjut, staf Bapak/Ibu dapat menghubungi Saudara Irhamni di nomor kontak 0888-7707-741.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan



ADIN BONDAR

Tembusan:

1. Kepala Perpustakaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
3. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

NILAI AKHIR IPLM PROVINSI

NO.	PROVINSI	VARIABEL SDM	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	IPLM
1	ACEH	0.495	0.416	0.403	0.5	0.456	0.452	45.29
2	BANTEN	0.667	0.487	0.526	0.67	0.577	0.598	48.59
3	BENGKULU	0.457	0.31	0.359	0.422	0.383	0.391	36.5
4	DI YOGYAKARTA	0.452	0.478	0.463	0.564	0.465	0.513	48.05
5	DKI JAKARTA	0.556	0.52	0.506	0.608	0.538	0.557	44.15
6	GORONTALO	0.244	0.095	0.139	0.169	0.17	0.154	10.46
7	JAMBI	0.615	0.514	0.532	0.652	0.565	0.592	25.53
8	JAWA BARAT	0.235	0.151	0.167	0.184	0.193	0.175	18.07
9	JAWA TENGAH	0.488	0.404	0.431	0.512	0.446	0.472	38.86
10	JAWA TIMUR	0.61	0.523	0.53	0.593	0.567	0.561	56.29
11	KALIMANTAN BARAT	0.558	0.366	0.395	0.474	0.462	0.434	34.98
12	KALIMANTAN SELATAN	0.31	0.25	0.22	0.273	0.28	0.246	25.16
13	KALIMANTAN TENGAH	0.201	0.146	0.104	0.197	0.173	0.151	6.28
14	KALIMANTAN TIMUR	0.469	0.45	0.394	0.472	0.46	0.433	44.11
15	KALIMANTAN UTARA	0.412	0.326	0.315	0.394	0.369	0.354	35.87
16	KEP. BANGKA BELITUNG	0.429	0.367	0.387	0.456	0.398	0.422	37.1
17	KEP. RIAU	0.516	0.406	0.415	0.638	0.461	0.527	36.04
18	LAMPUNG	0.525	0.332	0.336	0.423	0.428	0.38	32.3
19	MALUKU	0.194	0.382	0.387	0.485	0.288	0.436	30.18
20	MALUKU UTARA	0.191	0.068	0.152	0.152	0.13	0.152	10.98
21	NUSA TENGGARA BARAT	0.433	0.407	0.374	0.475	0.42	0.424	31.77
22	NUSA TENGGARA TIMUR	0.402	0.39	0.366	0.522	0.396	0.444	40.56
23	PAPUA	0.133	0.069	0.065	0.155	0.101	0.11	2.74
24	PAPUA BARAT	0.401	0.555	0.401	0.65	0.478	0.525	34.64
25	RIAU	0.369	0.381	0.394	0.489	0.375	0.441	27.02
26	SULAWESI BARAT	0.48	0.407	0.36	0.466	0.443	0.413	25.72
27	SULAWESI SELATAN	0.517	0.483	0.472	0.531	0.5	0.501	47.74
28	SULAWESI TENGAH	0.255	0.341	0.333	0.269	0.298	0.301	30.04
29	SULAWESI TENGGARA	0.335	0.267	0.259	0.336	0.301	0.298	29.24
30	SULAWESI UTARA	0.374	0.219	0.33	0.494	0.297	0.412	22.18
31	SUMATERA BARAT	0.419	0.424	0.395	0.483	0.421	0.439	43.36
32	SUMATERA SELATAN	0.537	0.409	0.382	0.495	0.473	0.439	37.81
33	SUMATERA UTARA	0.481	0.411	0.393	0.427	0.446	0.41	40.54

Catatan

Pengukuran IPLM dan TKM hanya dilakukan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang urusan perpustakaanannya ditangani oleh kelembagaan setingkat dinas.

NILAI AKHIR IPLM KABUPATEN/KOTA

NO.	KABUPATEN/KOTA	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL SDM	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	IPLM
1	KAB. ACEH BARAT	0.03	0.45	0.063	0.198	0.24	0.131	7.6
2	KAB. ACEH BARAT DAYA	0.147	0.178	0.127	0.198	0.162	0.163	5.45
3	KAB. ACEH BESAR	0.144	0.214	0.141	0.266	0.18	0.203	4.94
4	KAB. ACEH JAYA	0.296	0.202	0.322	0.383	0.249	0.353	11.96
5	KAB. ACEH SELATAN	0.133	0.164	0.115	0.229	0.148	0.172	8.24
6	KAB. ACEH SINGKIL	0.194	0.322	0.177	0.329	0.258	0.253	6.49
7	KAB. ACEH TAMIANG	0.069	0.09	0.049	0.086	0.08	0.068	4.15
8	KAB. ACEH TENGAH	0.163	0.218	0.122	0.234	0.191	0.178	7.33
9	KAB. ACEH TENGGARA	0.178	0.189	0.254	0.346	0.184	0.3	2.03
10	KAB. ACEH TIMUR	0.111	0.201	0.171	0.29	0.156	0.231	2.31
11	KAB. ACEH UTARA	0.245	0.261	0.181	0.276	0.253	0.228	3.06
12	KAB. ADM. KEP. SERIBU	0.093	0.022	0	0	0.058	0	0.49
13	KAB. AGAM	0.205	0.202	0.238	0.413	0.204	0.326	21.07
14	KAB. ALOR	0.265	0.277	0.246	0.287	0.271	0.267	0.72
15	KAB. ASAHAN	0.037	0.084	0.088	0.085	0.06	0.087	7.89
16	KAB. BADUNG	0.177	0.177	0.161	0.242	0.177	0.202	19.43
17	KAB. BALANGAN	0.137	0.169	0.122	0.208	0.153	0.165	10.72
18	KAB. BANDUNG	0.32	0.299	0.307	0.374	0.309	0.341	12.54
19	KAB. BANDUNG BARAT	0.246	0.293	0.328	0.431	0.269	0.38	17.51
20	KAB. BANGGAI	0.082	0.18	0.127	0.206	0.131	0.167	1.83
21	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	0.135	0.197	0.151	0.271	0.166	0.211	19.77
22	KAB. BANGGAI LAUT	0.04	0.069	0.042	0.078	0.055	0.06	4.34
23	KAB. BANGKA	0.068	0.128	0.113	0.144	0.098	0.129	11.96
24	KAB. BANGKA BARAT	0.233	0.231	0.243	0.286	0.232	0.265	25.5
25	KAB. BANGKALAN	0.16	0.277	0.153	0.275	0.218	0.214	2.99
26	KAB. BANGKA SELATAN	0.115	0.154	0.154	0.218	0.134	0.186	15.92
27	KAB. BANGKA TENGAH	0.136	0.103	0.109	0.124	0.12	0.117	11.77
28	KAB. BANJAR	0.229	0.164	0.141	0.265	0.196	0.203	8.95
29	KAB. BANJARNEGARA	0.178	0.105	0.112	0.134	0.141	0.122	11.49
30	KAB. BANTAENG	0.302	0.491	0.254	0.346	0.397	0.3	15.48
31	KAB. BANTUL	0.13	0.185	0.095	0.111	0.158	0.103	8.41
32	KAB. BANYUASIN	0.105	0.107	0.063	0.117	0.106	0.09	6.62
33	KAB. BANYUMAS	0.237	0.327	0.275	0.217	0.282	0.246	12.03
34	KAB. BANYUWANGI	0.117	0.15	0.36	0.397	0.133	0.379	30.52
35	KAB. BARITO KUALA	0.007	0.048	0.004	0.005	0.027	0.004	1.12
36	KAB. BARITO TIMUR	0.106	0.17	0.11	0.189	0.138	0.15	4.75
37	KAB. BARITO UTARA	0.086	0.145	0.046	0.087	0.115	0.066	2.75
38	KAB. BARRU	0.067	0.167	0.156	0.166	0.117	0.161	13.73
39	KAB. BATANG	0.135	0.153	0.211	0.236	0.144	0.224	19.96
40	KAB. BATANGHARI	0.142	0.264	0.113	0.243	0.203	0.178	4.75
41	KAB. BATU BARA	0.14	0.157	0.149	0.207	0.148	0.178	9.89
42	KAB. BEKASI	0.174	0.301	0.328	0.299	0.238	0.313	29.05
43	KAB. BELITUNG	0.158	0.245	0.148	0.249	0.201	0.198	19.78
44	KAB. BELITUNG TIMUR	0.142	0.167	0.19	0.286	0.155	0.238	21.3
45	KAB. BELU	0.117	0.132	0.126	0.181	0.124	0.154	8.61
46	KAB. BENER MERIAH	0.265	0.429	0.254	0.254	0.347	0.254	4.18
47	KAB. BENGKALIS	0.099	0.092	0.084	0.162	0.096	0.123	5.3
48	KAB. BENGKAYANG	0.186	0.272	0.225	0.409	0.229	0.317	29.06
49	KAB. BENGKULU SELATAN	0.155	0.195	0.121	0.178	0.175	0.15	7.79
50	KAB. BENGKULU TENGAH	0.146	0.337	0.185	0.257	0.241	0.221	3.68

51	KAB. BENGKULU UTARA	0.126	0.199	0.109	0.206	0.163	0.158	9.92
52	KAB. BERAU	0.193	0.118	0.136	0.204	0.156	0.17	9.39
53	KAB. BIMA	0.178	0.24	0.173	0.27	0.209	0.221	1.39
54	KAB. BINTAN	0.199	0.204	0.166	0.203	0.201	0.185	6.1
55	KAB. BIREUEN	0.125	0.212	0.142	0.33	0.168	0.236	10.59
56	KAB. BLITAR	0.103	0.201	0.209	0.262	0.152	0.235	21.05
57	KAB. BLORA	0.114	0.19	0.209	0.273	0.152	0.241	21.45
58	KAB. BOALEMO	0.319	0.266	0.32	0.368	0.293	0.344	1.46
59	KAB. BOGOR	0.564	0.589	0.542	0.714	0.577	0.628	9.5
60	KAB. BOJONEGORO	0.184	0.26	0.114	0.283	0.222	0.199	18.11
61	KAB. BOLAANG MONGONDOW	0.291	0.214	0.245	0.206	0.253	0.225	4.38
62	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	0.069	0.022	0.072	0.186	0.045	0.128	0.34
63	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	0.142	0.198	0.156	0.244	0.17	0.2	3.58
64	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	0.144	0.129	0.074	0.1	0.137	0.087	1.99
65	KAB. BOMBANA	0.083	0.158	0.215	0.475	0.121	0.345	23.4
66	KAB. BONDOWOSO	0.076	0.074	0.071	0.092	0.075	0.081	6.22
67	KAB. BONE	0.211	0.277	0.265	0.343	0.244	0.304	17.25
68	KAB. BONE BOLANGO	0.1	0.168	0.127	0.254	0.134	0.19	17.12
69	KAB. BOVEN DIGOEL	0.055	0.106	0.018	0.033	0.08	0.025	0.73
70	KAB. BOYOLALI	0.272	0.164	0.244	0.243	0.218	0.244	20.57
71	KAB. BREBES	0.11	0.243	0.115	0.12	0.177	0.118	13.57
72	KAB. BULELENG	0.202	0.172	0.218	0.314	0.187	0.266	2.53
73	KAB. BULUKUMBA	0.097	0.18	0.119	0.193	0.139	0.156	15.09
74	KAB. BULUNGAN	0.094	0.117	0.143	0.225	0.105	0.184	3.84
75	KAB. BUNGO	0.146	0.232	0.23	0.277	0.189	0.254	0.47
76	KAB. BUOL	0.112	0.175	0.11	0.18	0.144	0.145	14.48
77	KAB. BURU	0.078	0.129	0.098	0.157	0.104	0.128	6.02
78	KAB. BUTON	0.16	0.212	0.183	0.293	0.186	0.238	3.97
79	KAB. BUTON SELATAN	0.179	0.259	0.13	0.207	0.219	0.169	6.55
80	KAB. BUTON TENGAH	0.141	0.25	0.161	0.218	0.195	0.189	2.79
81	KAB. CIAMIS	0.108	0.115	0.169	0.261	0.111	0.216	18.42
82	KAB. CIANJUR	0.096	0.11	0.126	0.172	0.103	0.149	11.31
83	KAB. CILACAP	0.211	0.255	0.168	0.326	0.233	0.247	20.81
84	KAB. CIREBON	0.07	0.101	0.129	0.147	0.086	0.138	4.28
85	KAB. DELI SERDANG	0.183	0.162	0.098	0.109	0.172	0.104	8.91
86	KAB. DEMAK	0.07	0.05	0.112	0.106	0.06	0.109	9.42
87	KAB. DHARMASRAYA	0.129	0.229	0.217	0.325	0.179	0.271	19.04
88	KAB. DOMPU	0.306	0.173	0.21	0.28	0.239	0.245	0.58
89	KAB. DONGGALA	0.138	0.137	0.121	0.185	0.137	0.153	5.82
90	KAB. EMPAT LAWANG	0.108	0.235	0.137	0.285	0.171	0.211	17.77
91	KAB. ENREKANG	0.135	0.29	0.279	0.401	0.213	0.34	30.2
92	KAB. FAKFAK	0.114	0.241	0.155	0.182	0.178	0.169	1.34
93	KAB. FLORES TIMUR	0.044	0.073	0.073	0.052	0.059	0.063	0.5
94	KAB. GARUT	0.036	0.047	0.031	0.051	0.042	0.041	4.12
95	KAB. GAYO LUES	0.044	0.068	0.08	0.154	0.056	0.117	9.88
96	KAB. GIANJAR	0.122	0.12	0.122	0.177	0.121	0.149	6.04
97	KAB. GORONTALO	0.171	0.16	0.178	0.229	0.165	0.203	1.37
98	KAB. GORONTALO UTARA	0.046	0.166	0.11	0.232	0.105	0.171	0.74
99	KAB. GOWA	0.18	0.248	0.167	0.268	0.214	0.217	7.75
100	KAB. GRESIK	0.057	0.055	0.053	0.083	0.056	0.068	6.42
101	KAB. GROBOGAN	0.239	0.33	0.294	0.523	0.285	0.408	37.12
102	KAB. GUNUNGKIDUL	0.129	0.153	0.142	0.214	0.141	0.178	16.67
103	KAB. GUNUNG MAS	0.092	0.105	0.053	0.026	0.098	0.04	4.33

104	KAB. HALMAHERA BARAT	0.224	0.171	0.184	0.178	0.198	0.181	1.35
105	KAB. HALMAHERA SELATAN	0.119	0.114	0.082	0.184	0.117	0.133	2.2
106	KAB. HALMAHERA TENGAH	0.14	0.354	0.218	0.402	0.247	0.31	2.73
107	KAB. HALMAHERA UTARA	0.127	0.128	0.104	0.147	0.127	0.125	1.68
108	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0.223	0.308	0.229	0.349	0.266	0.289	27.36
109	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0.101	0.178	0.092	0.21	0.14	0.151	5.84
110	KAB. HULU SUNGAI UTARA	0.099	0.119	0.143	0.148	0.109	0.146	13.46
111	KAB. INDRAGIRI HILIR	0.155	0.331	0.217	0.322	0.243	0.269	1.87
112	KAB. INDRAGIRI HULU	0.095	0.07	0.025	0.034	0.083	0.03	4.57
113	KAB. INDRAMAYU	0.101	0.078	0.083	0.129	0.089	0.106	2.88
114	KAB. JEMBER	0.172	0.213	0.212	0.264	0.192	0.238	5.59
115	KAB. JENEPONTO	0.226	0.272	0.306	0.297	0.249	0.302	27.48
116	KAB. JEPARA	0.188	0.207	0.187	0.243	0.198	0.215	10.35
117	KAB. JOMBANG	0.079	0.11	0.292	0.369	0.094	0.33	23.58
118	KAB. KAIMANA	0.055	0.016	0.081	0.245	0.036	0.163	4.59
119	KAB. KAMPAR	0.141	0.143	0.243	0.305	0.142	0.274	13.38
120	KAB. KAPUAS	0.112	0.206	0.128	0.253	0.159	0.19	1.17
121	KAB. KAPUAS HULU	0.044	0.1	0.24	0.32	0.072	0.28	21.77
122	KAB. KARANGANYAR	0.114	0.116	0.087	0.141	0.115	0.114	11.43
123	KAB. KARANGASEM	0.082	0.09	0.073	0.145	0.086	0.11	5.72
124	KAB. KARAWANG	0.177	0.187	0.192	0.243	0.181	0.218	4.22
125	KAB. KARIMUN	0.079	0.111	0.075	0.132	0.095	0.104	10.1
126	KAB. KARO	0.045	0.029	0.026	0.038	0.037	0.031	3.32
127	KAB. KAUR	0.183	0.281	0.133	0.187	0.232	0.16	0.25
128	KAB. KAYONG UTARA	0.057	0.119	0.091	0.102	0.088	0.097	5.19
129	KAB. KEBUMEN	0.429	0.25	0.508	0.354	0.34	0.431	40.36
130	KAB. KEDIRI	0.092	0.136	0.103	0.148	0.114	0.126	4.99
131	KAB. KENDAL	0.158	0.169	0.182	0.275	0.164	0.228	20.1
132	KAB. KEPAHANG	0.28	0.325	0.231	0.358	0.302	0.295	2.51
133	KAB. KEP. ANAMBAS	0.103	0.167	0.213	0.301	0.135	0.257	14.24
134	KAB. KEPULAUAN ARU	0.133	0.209	0.153	0.2	0.171	0.176	17.46
135	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	0.01	0.022	0.068	0.13	0.016	0.099	7.4
136	KAB. KEPULAUAN MERANTI	0.308	0.316	0.227	0.345	0.312	0.286	29.38
137	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	0.068	0.157	0.091	0.146	0.113	0.119	11.69
138	KAB. KEP. SELAYAR	0.041	0.163	0.037	0.054	0.102	0.046	5.72
139	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	0.064	0.074	0.101	0.112	0.069	0.106	9.52
140	KAB. KEPULAUAN SULA	0.068	0.139	0.101	0.154	0.103	0.127	12.01
141	KAB. KEPULAUAN TALAUD	0.139	0.174	0.136	0.232	0.156	0.184	17.58
142	KAB. KERINCI	0.165	0.177	0.271	0.243	0.171	0.257	1.47
143	KAB. KETAPANG	0.083	0.08	0.095	0.137	0.081	0.116	10.55
144	KAB. KLATEN	0.086	0.147	0.115	0.134	0.117	0.125	12.24
145	KAB. KLUNGKUNG	0.077	0.145	0.151	0.23	0.111	0.19	16.69
146	KAB. KOLAKA	0.172	0.252	0.165	0.276	0.212	0.221	3.49
147	KAB. KOLAKA TIMUR	0.166	0.225	0.229	0.275	0.196	0.252	4.05
148	KAB. KOLAKA UTARA	0.277	0.42	0.229	0.26	0.349	0.245	7.14
149	KAB. KONAWE	0.05	0.05	0.045	0.074	0.05	0.06	5.69
150	KAB. KONAWE KEPULAUAN	0.299	0.146	0.265	0.303	0.222	0.284	26.55
151	KAB. KONAWE SELATAN	0.149	0.23	0.147	0.227	0.19	0.187	3.44
152	KAB. KONAWE UTARA	0.065	0.1	0.06	0.032	0.082	0.046	0.34
153	KAB. KOTABARU	0.124	0.244	0.152	0.351	0.184	0.252	10.98
154	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	0.151	0.225	0.071	0.194	0.188	0.132	14.9
155	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	0.094	0.144	0.088	0.156	0.119	0.122	3.9
156	KAB. KUANTAN SINGINGI	0.214	0.268	0.306	0.375	0.241	0.34	0.7

157	KAB. KUBU RAYA	0.099	0.164	0.152	0.242	0.132	0.197	3.76
158	KAB. KUDUS	0.154	0.327	0.197	0.301	0.241	0.249	24.65
159	KAB. KULON PROGO	0.233	0.182	0.189	0.289	0.208	0.239	20.47
160	KAB. KUNINGAN	0.177	0.199	0.194	0.249	0.188	0.222	2.99
161	KAB. KUPANG	0.087	0.085	0.097	0.096	0.086	0.097	0.15
162	KAB. KUTAI BARAT	0.125	0.185	0.09	0.141	0.155	0.115	4.04
163	KAB. KUTAI KARTANEGARA	0.283	0.28	0.262	0.267	0.281	0.264	12.81
164	KAB. KUTAI TIMUR	0.152	0.152	0.153	0.224	0.152	0.188	10.05
165	KAB. LABUHANBATU	0.127	0.179	0.107	0.266	0.153	0.187	2.73
166	KAB. LABUHANBATU SELATAN	0.159	0.164	0.127	0.222	0.162	0.174	13.85
167	KAB. LABUHANBATU UTARA	0.038	0.12	0.062	0.126	0.079	0.094	0.81
168	KAB. LAHAT	0.073	0.163	0.074	0.144	0.118	0.109	6.3
169	KAB. LAMANDAU	0.116	0.112	0.093	0.153	0.114	0.123	9.44
170	KAB. LAMONGAN	0.121	0.247	0.179	0.262	0.184	0.22	18.9
171	KAB. LAMPUNG BARAT	0.296	0.496	0.377	0.528	0.396	0.452	15.25
172	KAB. LAMPUNG SELATAN	0.039	0.03	0.042	0.073	0.034	0.058	0.13
173	KAB. LAMPUNG TENGAH	0.027	0.022	0.07	0.063	0.024	0.067	0.05
174	KAB. LAMPUNG TIMUR	0.117	0.173	0.118	0.256	0.145	0.187	12.78
175	KAB. LAMPUNG UTARA	0.098	0.111	0.121	0.103	0.104	0.112	10.98
176	KAB. LANDAK	0.088	0.138	0.043	0.1	0.113	0.072	4.04
177	KAB. LANGKAT	0.138	0.168	0.127	0.22	0.153	0.173	8.9
178	KAB. LEBAK	0.214	0.137	0.199	0.261	0.176	0.23	0.6
179	KAB. LEBONG	0.111	0.184	0.106	0.218	0.147	0.162	6.05
180	KAB. LEMBATA	0.155	0.264	0.167	0.291	0.209	0.229	3.28
181	KAB. LIMA PULUH KOTA	0.184	0.185	0.186	0.264	0.184	0.225	19.87
182	KAB. LINGGA	0.035	0.061	0.124	0.126	0.048	0.126	10.23
183	KAB. LOMBOK BARAT	0.082	0.092	0.113	0.105	0.087	0.109	3.28
184	KAB. LOMBOK TENGAH	0.014	0.024	0.014	0.02	0.019	0.017	1.73
185	KAB. LOMBOK TIMUR	0.223	0.268	0.215	0.274	0.246	0.244	0.81
186	KAB. LOMBOK UTARA	0.036	0.055	0.106	0.088	0.046	0.097	8.15
187	KAB. LUMAJANG	0.091	0.171	0.074	0.127	0.131	0.101	7.29
188	KAB. LUWU	0.068	0.151	0.091	0.165	0.11	0.128	5.53
189	KAB. LUWU TIMUR	0.126	0.126	0.127	0.204	0.126	0.165	15.37
190	KAB. LUWU UTARA	0.157	0.206	0.198	0.324	0.182	0.261	7.01
191	KAB. MADIUN	0.098	0.138	0.096	0.19	0.118	0.143	13.56
192	KAB. MAGELANG	0.193	0.286	0.243	0.222	0.239	0.233	12.31
193	KAB. MAGETAN	0.078	0.042	0.061	0.064	0.06	0.062	6.04
194	KAB. MAJALENGKA	0.102	0.101	0.101	0.149	0.101	0.125	5.78
195	KAB. MAJENE	0.214	0.29	0.199	0.226	0.252	0.213	2.13
196	KAB. MALAKA	0.097	0.05	0.159	0.136	0.073	0.148	0.97
197	KAB. MALANG	0.145	0.154	0.143	0.267	0.149	0.205	5.83
198	KAB. MALINAU	0.143	0.154	0.137	0.193	0.149	0.165	6.34
199	KAB. MALUKU TENGAH	0.142	0.132	0.127	0.16	0.137	0.143	1.45
200	KAB. MALUKU TENGGARA	0.059	0.078	0.074	0.07	0.069	0.072	1.61
201	KAB. MAMUJU	0.181	0.183	0.193	0.283	0.182	0.238	1.23
202	KAB. MANDAILING NATAL	0.028	0.079	0.059	0.107	0.054	0.083	4.75
203	KAB. MANGGARAI	0.143	0.236	0.254	0.313	0.189	0.284	3.47
204	KAB. MANGGARAI BARAT	0.017	0.054	0.016	0.025	0.036	0.02	2.49
205	KAB. MANGGARAI TIMUR	0.03	0.073	0.186	0.217	0.052	0.202	8.65
206	KAB. MANOKWARI	0.397	0.256	0.292	0.425	0.326	0.359	4.36
207	KAB. MAPPI	0.109	0.13	0.11	0.179	0.12	0.144	0.22
208	KAB. MAROS	0.183	0.161	0.231	0.256	0.172	0.243	22.17
209	KAB. MAYBRAT	0.062	0	0.026	0.099	0.031	0.062	0.05

210	KAB. MELAWI	0.104	0.151	0.128	0.215	0.128	0.171	3.75
211	KAB. MEMPAWAH	0.13	0.272	0.123	0.286	0.201	0.204	2.96
212	KAB. MERANGIN	0.09	0.085	0.088	0.13	0.087	0.109	1.94
213	KAB. MERAUKE	0.036	0.074	0.069	0.154	0.055	0.112	0.66
214	KAB. MESUJI	0.115	0.19	0.16	0.242	0.152	0.201	13.76
215	KAB. MIMIKA	0.153	0.352	0.17	0.274	0.253	0.222	3.93
216	KAB. MINAHASA	0.091	0.096	0.085	0.104	0.094	0.094	0.16
217	KAB. MINAHASA SELATAN	0.08	0.101	0.092	0.05	0.09	0.071	0.09
218	KAB. MINAHASA TENGGARA	0.121	0.206	0.222	0.228	0.164	0.225	0.39
219	KAB. MINAHASA UTARA	0.196	0.195	0.18	0.289	0.196	0.235	6.6
220	KAB. MOJOKERTO	0.077	0.064	0.115	0.204	0.071	0.16	13.3
221	KAB. MOROWALI	0.117	0.13	0.084	0.127	0.123	0.106	7.49
222	KAB. MOROWALI UTARA	0.093	0.084	0.08	0.104	0.089	0.092	1.8
223	KAB. MUARA ENIM	0.136	0.154	0.107	0.228	0.145	0.168	9.64
224	KAB. MUARO JAMBI	0.1	0.119	0.077	0.146	0.11	0.111	3.39
225	KAB. MUKO MUKO	0.147	0.133	0.121	0.17	0.14	0.145	0.26
226	KAB. MUNA	0.067	0.138	0.114	0.179	0.103	0.146	4.16
227	KAB. MUNA BARAT	0.073	0.104	0.121	0.13	0.088	0.125	5.84
228	KAB. MURUNG RAYA	0.146	0.305	0.127	0.238	0.226	0.182	0.55
229	KAB. MUSI BANYUASIN	0.153	0.219	0.195	0.268	0.186	0.231	6.03
230	KAB. MUSI RAWAS	0.322	0.43	0.23	0.336	0.376	0.283	6.32
231	KAB. MUSI RAWAS UTARA	0.091	0.254	0.109	0.186	0.172	0.148	14.63
232	KAB. NAGAN RAYA	0.133	0.203	0.106	0.159	0.168	0.132	7.08
233	KAB. NAGEKEO	0.157	0.21	0.148	0.274	0.184	0.211	3.72
234	KAB. NATUNA	0.086	0.109	0.131	0.135	0.097	0.133	10.91
235	KAB. NGADA	0.122	0.3	0.16	0.181	0.211	0.171	2.06
236	KAB. NGANJUK	0.319	0.187	0.365	0.406	0.253	0.385	23.4
237	KAB. NGAWI	0.185	0.197	0.158	0.242	0.191	0.2	10.02
238	KAB. NIAS	0.088	0.134	0.082	0.186	0.111	0.134	1.52
239	KAB. NIAS BARAT	0.295	0.333	0.258	0.246	0.314	0.252	2.65
240	KAB. NIAS SELATAN	0.162	0.116	0.033	0.118	0.139	0.076	0.11
241	KAB. NIAS UTARA	0.109	0.202	0.085	0.117	0.156	0.101	0.15
242	KAB. NUNUKAN	0.104	0.129	0.101	0.167	0.116	0.134	5.31
243	KAB. OGAN ILIR	0.037	0.124	0.05	0.057	0.08	0.054	5.49
244	KAB. OGAN KOMERING ILIR	0.3	0.413	0.277	0.315	0.356	0.296	30.32
245	KAB. OGAN KOMERING ULU	0.406	0.585	0.375	0.549	0.495	0.462	10.71
246	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	0.147	0.225	0.161	0.288	0.186	0.225	8.76
247	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	0.044	0.132	0.072	0.041	0.088	0.057	5.14
248	KAB. PACITAN	0.108	0.118	0.084	0.144	0.113	0.114	8.01
249	KAB. PADANG LAWAS	0.293	0.335	0.238	0.353	0.314	0.296	1.64
250	KAB. PADANG LAWAS UTARA	0.086	0.164	0.1	0.237	0.125	0.169	1.63
251	KAB. PADANG PARIAMAN	0.103	0.141	0.117	0.212	0.122	0.164	7.79
252	KAB. PAKPAK BHARAT	0.26	0.084	0.105	0.14	0.172	0.123	8.26
253	KAB. PAMEKASAN	0.134	0.235	0.192	0.377	0.184	0.284	4.89
254	KAB. PANDEGLANG	0.179	0.186	0.182	0.247	0.182	0.214	4.87
255	KAB. PANGANDARAN	0.208	0.135	0.2	0.194	0.172	0.197	8.64
256	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.	0.399	0.506	0.52	0.675	0.453	0.597	55.41
257	KAB. PARIGI MOUTONG	0.146	0.15	0.156	0.208	0.148	0.182	2.71
258	KAB. PASAMAN	0.078	0.15	0.11	0.253	0.114	0.181	7.19
259	KAB. PASAMAN BARAT	0.11	0.173	0.108	0.153	0.141	0.131	6.11
260	KAB. PASANGKAYU	0.216	0.284	0.105	0.268	0.25	0.186	3.06
261	KAB. PASER	0.165	0.176	0.147	0.216	0.171	0.181	5.51
262	KAB. PASURUAN	0.151	0.186	0.169	0.332	0.169	0.251	3.18

263	KAB. PATI	0.234	0.274	0.259	0.319	0.254	0.289	11.86
264	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	0	0.045	0.004	0.011	0.023	0.008	0.04
265	KAB. PEKALONGAN	0.225	0.003	0.04	0.025	0.114	0.032	4.71
266	KAB. PELALAWAN	0.158	0.235	0.15	0.254	0.197	0.202	2.96
267	KAB. PEMALANG	0.216	0.236	0.201	0.229	0.226	0.215	14.88
268	KAB. PENAJAM PASER UTARA	0.191	0.177	0.178	0.191	0.184	0.184	18.2
269	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0.086	0.183	0.127	0.14	0.135	0.133	13.37
270	KAB. PESAWARAN	0.031	0.162	0.087	0.097	0.097	0.092	6.37
271	KAB. PESISIR SELATAN	0.197	0.293	0.189	0.259	0.245	0.224	7.06
272	KAB. PIDIE	0.163	0.288	0.203	0.337	0.225	0.27	13.07
273	KAB. PIDIE JAYA	0.225	0.292	0.173	0.397	0.259	0.285	17.62
274	KAB. PINRANG	0.037	0.012	0.123	0.274	0.025	0.198	10.62
275	KAB. POHUWATO	0.118	0.172	0.119	0.231	0.145	0.175	6.85
276	KAB. POLEWALI MANDAR	0.195	0.315	0.229	0.271	0.255	0.25	0.2
277	KAB. PONOROGO	0.156	0.184	0.165	0.244	0.17	0.204	5.89
278	KAB. POSO	0.093	0.114	0.103	0.189	0.104	0.147	6.21
279	KAB. PRINGSEWU	0.086	0.091	0.106	0.15	0.089	0.128	11.13
280	KAB. PROBOLINGGO	0.127	0.083	0.123	0.288	0.105	0.205	15.5
281	KAB. PULANG PISAU	0.048	0.076	0.065	0.07	0.062	0.067	0.54
282	KAB. PULAU MOROTAI	0.201	0.266	0.177	0.28	0.233	0.228	10.74
283	KAB. PULAU TALIABU	0.129	0.161	0.145	0.166	0.145	0.155	10.3
284	KAB. PURBALINGGA	0.157	0.199	0.164	0.298	0.177	0.231	14.07
285	KAB. PURWAKARTA	0.014	0.02	0.018	0.019	0.017	0.019	1.82
286	KAB. PURWOREJO	0.133	0.128	0.116	0.191	0.13	0.153	9.36
287	KAB. REJANG LEBONG	0.166	0.112	0.148	0.211	0.139	0.179	1.95
288	KAB. REMBANG	0.041	0.053	0.04	0.065	0.047	0.053	0.45
289	KAB. ROKAN HILIR	0.136	0.173	0.108	0.216	0.154	0.162	2.8
290	KAB. ROKAN HULU	0.182	0.174	0.144	0.189	0.178	0.167	5.33
291	KAB. ROTE NDAO	0.17	0.137	0.206	0.195	0.154	0.2	9.05
292	KAB. SABU RAIJUA	0.17	0.305	0.205	0.393	0.237	0.299	28.05
293	KAB. SAMBAS	0.047	0.1	0.072	0.103	0.074	0.087	8.34
294	KAB. SAMPANG	0.209	0.229	0.179	0.304	0.219	0.242	2.52
295	KAB. SANGGAU	0.183	0.418	0.565	0.453	0.3	0.509	32.02
296	KAB. SARMI	0.114	0.193	0.094	0.199	0.153	0.146	5.17
297	KAB. SAROLANGUN	0.138	0.128	0.177	0.301	0.133	0.239	20.71
298	KAB. SEKADAU	0.228	0.309	0.211	0.4	0.269	0.305	1.49
299	KAB. SELUMA	0.126	0.179	0.106	0.167	0.152	0.136	7.07
300	KAB. SEMARANG	0.219	0.177	0.215	0.309	0.198	0.262	11.59
301	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	0.179	0.225	0.156	0.289	0.202	0.223	5.78
302	KAB. SERANG	0.211	0.175	0.202	0.292	0.193	0.247	3.52
303	KAB. SERDANG BEDAGAI	0.229	0.195	0.156	0.238	0.212	0.197	1.18
304	KAB. SERUYAN	0.091	0.135	0.134	0.2	0.113	0.167	9.86
305	KAB. SIAK	0.062	0.096	0.086	0.155	0.079	0.121	10.81
306	KAB. SIDENRENG RAPPANG	0.098	0.157	0.22	0.234	0.128	0.227	19.73
307	KAB. SIDOARJO	0.245	0.272	0.256	0.35	0.259	0.303	10.96
308	KAB. SIGI	0.231	0.11	0.18	0.387	0.171	0.283	22.84
309	KAB. SIJUNJUNG	0.248	0.195	0.2	0.297	0.221	0.248	11.04
310	KAB. SIKKA	0.155	0.135	0.134	0.31	0.145	0.222	1.48
311	KAB. SIMEULUE	0.157	0.133	0.181	0.459	0.145	0.32	0.85
312	KAB. SINJAI	0.076	0.217	0.11	0.156	0.146	0.133	13.7
313	KAB. SINTANG	0.246	0.202	0.146	0.259	0.224	0.203	0.9
314	KAB. SITUBONDO	0.11	0.173	0.118	0.205	0.141	0.162	10.24
315	KAB. SLEMAN	0.182	0.155	0.172	0.251	0.169	0.212	11.14

316	KAB. SOLOK	0.227	0.414	0.352	0.332	0.32	0.342	1.36
317	KAB. SOLOK SELATAN	0.117	0.086	0.127	0.146	0.101	0.137	6.57
318	KAB. SOPPENG	0.058	0.123	0.054	0.163	0.091	0.109	10.34
319	KAB. SORONG	0.329	0.278	0.164	0.291	0.304	0.227	0.88
320	KAB. SRAGEN	0.045	0.069	0.078	0.046	0.057	0.062	6.05
321	KAB. SUBANG	0.107	0.431	0.183	0.292	0.269	0.237	4.81
322	KAB. SUKABUMI	0.049	0.054	0.189	0.229	0.051	0.209	13.66
323	KAB. SUKAMARA	0.126	0.241	0.167	0.262	0.183	0.215	19.17
324	KAB. SUKOHARJO	0.298	0.254	0.287	0.448	0.276	0.368	23.8
325	KAB. SUMBA BARAT	0.123	0.185	0.226	0.331	0.154	0.278	20
326	KAB. SUMBA BARAT DAYA	0.097	0.239	0.09	0.19	0.168	0.14	0.48
327	KAB. SUMBA TENGAH	0.266	0.43	0.272	0.26	0.348	0.266	2.88
328	KAB. SUMBA TIMUR	0.109	0.131	0.129	0.214	0.12	0.171	2.82
329	KAB. SUMBAWA	0.139	0.17	0.154	0.228	0.154	0.191	2.95
330	KAB. SUMBAWA BARAT	0.154	0.227	0.154	0.3	0.191	0.227	13.37
331	KAB. SUMEDANG	0.084	0.117	0.076	0.105	0.1	0.091	8.78
332	KAB. SUMENEP	0.097	0.228	0.244	0.24	0.162	0.242	10.65
333	KAB. SUPIORI	0.039	0.077	0.059	0.159	0.058	0.109	7.94
334	KAB. TABALONG	0.136	0.209	0.229	0.446	0.173	0.338	28.82
335	KAB. TABANAN	0.299	0.333	0.291	0.362	0.316	0.326	0.8
336	KAB. TAKALAR	0.345	0.372	0.279	0.294	0.358	0.287	26.38
337	KAB. TANAH BUMBU	0.05	0.211	0.136	0.235	0.13	0.186	13.92
338	KAB. TANAH DATAR	0.229	0.172	0.255	0.32	0.2	0.288	3.06
339	KAB. TANAH LAUT	0.152	0.16	0.093	0.143	0.156	0.118	4.33
340	KAB. TANA TIDUNG	0.087	0.191	0.103	0.219	0.139	0.161	6.16
341	KAB. TANA TORAJA	0.176	0.389	0.299	0.357	0.283	0.328	1.83
342	KAB. TANGERANG	0.241	0.417	0.289	0.418	0.329	0.354	11.79
343	KAB. TANGGAMUS	0.028	0.077	0.101	0.025	0.053	0.062	5.96
344	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0.254	0.244	0.205	0.363	0.249	0.284	14.19
345	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	0.282	0.144	0.2	0.183	0.213	0.192	1.28
346	KAB. TAPANULI SELATAN	0.11	0.14	0.116	0.201	0.125	0.158	6.21
347	KAB. TAPANULI TENGAH	0.112	0.132	0.081	0.136	0.122	0.108	1.28
348	KAB. TAPIN	0.058	0.108	0.081	0.093	0.083	0.087	8.6
349	KAB. TEBO	0.142	0.141	0.187	0.276	0.142	0.232	1.34
350	KAB. TEGAL	0.199	0.25	0.227	0.284	0.225	0.255	6
351	KAB. TELUK BINTUNI	0.09	0.08	0.117	0.06	0.085	0.088	6.58
352	KAB. TELUK WONDAMA	0.162	0.164	0.172	0.313	0.163	0.243	14.83
353	KAB. TEMANGGUNG	0.167	0.259	0.37	0.376	0.213	0.373	24.03
354	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	0.103	0.216	0.16	0.216	0.159	0.188	0.34
355	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	0.146	0.21	0.171	0.319	0.178	0.245	0.37
356	KAB. TOBA	0.051	0.067	0.181	0.181	0.06	0.181	10.78
357	KAB. TOJO UNA-UNA	0.32	0.178	0.213	0.221	0.249	0.217	8.68
358	KAB. TOLI TOLI	0.21	0.279	0.191	0.299	0.244	0.245	2.22
359	KAB. TRENGGALEK	0.217	0.199	0.206	0.27	0.208	0.238	14.06
360	KAB. TUBAN	0.236	0.185	0.292	0.32	0.211	0.306	12.27
361	KAB. TULANG BAWANG	0.085	0.129	0.075	0.121	0.107	0.098	7.61
362	KAB. TULANG BAWANG BARAT	0.309	0.262	0.291	0.116	0.285	0.204	5.67
363	KAB. TULUNGAGUNG	0.11	0.13	0.175	0.215	0.12	0.195	10.46
364	KAB. WAKATOBI	0.035	0.088	0.085	0.08	0.061	0.082	7.46
365	KAB. WAROPEN	0.032	0.11	0.043	0.145	0.071	0.094	1.48
366	KAB. WAY KANAN	0.389	0.252	0.378	0.544	0.321	0.461	37.15
367	KAB. WONOGIRI	0.086	0.109	0.239	0.333	0.097	0.286	15.83
368	KAB. WONOSOBO	0.122	0.146	0.229	0.286	0.134	0.257	20.41

369	KAB. YAHUKIMO	0.068	0.099	0.068	0.113	0.084	0.09	0.1
370	KOTA AMBON	0.108	0.162	0.095	0.124	0.135	0.11	11.74
371	KOTA BALIKPAPAN	0.303	0.259	0.316	0.396	0.281	0.356	22.83
372	KOTA BANDA ACEH	0.117	0.179	0.176	0.352	0.148	0.264	17.37
373	KOTA BANDAR LAMPUNG	0.089	0.106	0.078	0.186	0.098	0.132	11.11
374	KOTA BANDUNG	0.111	0.137	0.126	0.203	0.124	0.165	15.23
375	KOTA BANJAR	0.113	0.102	0.15	0.225	0.108	0.188	14.65
376	KOTA BANJARBARU	0.139	0.22	0.146	0.247	0.179	0.197	18.49
377	KOTA BANJARMASIN	0.102	0.155	0.104	0.155	0.128	0.13	12.91
378	KOTA BATAM	0.114	0.189	0.142	0.192	0.151	0.167	12.36
379	KOTA BATU	0.417	0.429	0.429	0.647	0.423	0.538	36.57
380	KOTA BEKASI	0.092	0.208	0.087	0.175	0.15	0.131	9.41
381	KOTA BENGKULU	0.242	0.262	0.211	0.373	0.252	0.292	4
382	KOTA BIMA	0.127	0.206	0.157	0.266	0.167	0.212	19.83
383	KOTA BINJAI	0.171	0.237	0.262	0.327	0.204	0.295	14.48
384	KOTA BITUNG	0.168	0.197	0.146	0.285	0.183	0.215	6.08
385	KOTA BLITAR	0.144	0.155	0.129	0.206	0.15	0.167	15.54
386	KOTA BOGOR	0.208	0.333	0.214	0.274	0.271	0.244	10.02
387	KOTA BONTANG	0.542	0.39	0.466	0.576	0.466	0.521	42.85
388	KOTA BUKITTINGGI	0.414	0.471	0.405	0.469	0.442	0.437	20.06
389	KOTA CILEGON	0.328	0.114	0.364	0.268	0.221	0.316	28.75
390	KOTA CIREBON	0.191	0.274	0.208	0.331	0.233	0.269	9.93
391	KOTA DENPASAR	0.124	0.163	0.236	0.318	0.143	0.277	18.69
392	KOTA DEPOK	0.022	0.052	0.012	0.026	0.037	0.019	2.41
393	KOTA DUMAI	0.087	0.229	0.148	0.291	0.158	0.219	18.44
394	KOTA GORONTALO	0.154	0.157	0.138	0.189	0.156	0.163	16.12
395	KOTA GUNUNGSITOLI	0.124	0.143	0.149	0.144	0.133	0.146	5.5
396	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	0.28	0.222	0.378	0.278	0.251	0.328	30.46
397	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	0.161	0.175	0.176	0.255	0.168	0.216	16.23
398	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	0.491	0.447	0.484	0.454	0.469	0.469	7.24
399	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	0.213	0.197	0.212	0.291	0.205	0.251	5.27
400	KOTA ADM. JAKARTA UTARA	0.284	0.222	0.39	0.273	0.253	0.332	30.81
401	KOTA JAMBI	0.192	0.177	0.18	0.252	0.184	0.216	10.97
402	KOTA JAYAPURA	0.141	0.18	0.204	0.316	0.161	0.26	6.75
403	KOTA KEDIRI	0.128	0.136	0.239	0.241	0.132	0.24	20.75
404	KOTA KENDARI	0.132	0.154	0.13	0.187	0.143	0.159	13.77
405	KOTA KOTAMOBAGU	0.187	0.251	0.151	0.236	0.219	0.194	8.98
406	KOTA KUPANG	0.146	0.146	0.121	0.269	0.146	0.195	8.81
407	KOTA LANGSA	0.088	0.098	0.116	0.188	0.093	0.152	11
408	KOTA LHOKEUMAWE	0.235	0.181	0.19	0.295	0.208	0.242	16.77
409	KOTA LUBUK LINGGAU	0.113	0.168	0.105	0.216	0.141	0.161	13.64
410	KOTA MADIUN	0.574	0.355	0.64	0.606	0.464	0.623	42.87
411	KOTA MAGELANG	0.253	0.238	0.255	0.375	0.246	0.315	29.4
412	KOTA MAKASSAR	0.226	0.223	0.246	0.29	0.225	0.268	10.24
413	KOTA MALANG	0.322	0.151	0.286	0.294	0.236	0.29	27.41
414	KOTA MANADO	0.234	0.218	0.3	0.292	0.226	0.295	9.23
415	KOTA MATARAM	0.056	0.081	0.061	0.109	0.068	0.085	4.33
416	KOTA MEDAN	0.04	0.027	0.022	0.027	0.034	0.025	2.64
417	KOTA METRO	0.259	0.19	0.28	0.363	0.225	0.321	21.85
418	KOTA MOJOKERTO	0.158	0.236	0.287	0.377	0.197	0.332	29.14
419	KOTA PADANG	0.153	0.259	0.153	0.208	0.206	0.18	18.76
420	KOTA PADANG PANJANG	0.118	0.283	0.237	0.47	0.2	0.353	30.74
421	KOTA PADANG SIDIMPUAN	0.151	0.268	0.127	0.209	0.21	0.168	0.43

422	KOTA PAGAR ALAM	0.08	0.125	0.098	0.174	0.102	0.136	12.59
423	KOTA PALEMBANG	0.095	0.11	0.129	0.205	0.103	0.167	14.78
424	KOTA PALOPO	0.097	0.12	0.104	0.211	0.109	0.157	14.28
425	KOTA PALU	0.179	0.294	0.231	0.439	0.236	0.335	30.54
426	KOTA PANGKAL PINANG	0.134	0.178	0.121	0.19	0.156	0.156	15.59
427	KOTA PARE PARE	0.173	0.135	0.256	0.278	0.154	0.267	23.32
428	KOTA PARIAMAN	0.11	0.171	0.121	0.211	0.141	0.166	11.19
429	KOTA PASURUAN	0.388	0.166	0.378	0.367	0.277	0.373	21.25
430	KOTA PAYAKUMBUH	0.133	0.159	0.126	0.215	0.146	0.171	16.32
431	KOTA PEKALONGAN	0.177	0.172	0.162	0.416	0.175	0.289	18.74
432	KOTA PEKANBARU	0.108	0.173	0.081	0.246	0.141	0.163	15.64
433	KOTA PEMATANG SIANTAR	0.187	0.244	0.257	0.509	0.216	0.383	26.91
434	KOTA PONTIANAK	0.459	0.207	0.322	0.388	0.333	0.355	34.85
435	KOTA PRABUMULIH	0.074	0.311	0.124	0.092	0.192	0.108	11.15
436	KOTA PROBOLINGGO	0.069	0.066	0.083	0.126	0.067	0.105	9.34
437	KOTA SABANG	0.187	0.186	0.086	0.192	0.187	0.139	3.8
438	KOTA SALATIGA	0.18	0.26	0.197	0.289	0.22	0.243	22.99
439	KOTA SAMARINDA	0.343	0.333	0.345	0.42	0.337	0.382	8.71
440	KOTA SAWAHLUNTO	0.239	0.176	0.167	0.214	0.207	0.19	16.17
441	KOTA SEMARANG	0.206	0.339	0.268	0.482	0.273	0.375	17.61
442	KOTA SERANG	0.194	0.207	0.269	0.248	0.201	0.258	10.35
443	KOTA SIBOLGA	0.114	0.176	0.136	0.189	0.145	0.162	15.72
444	KOTA SINGKAWANG	0.13	0.161	0.137	0.204	0.145	0.17	16.28
445	KOTA SOLOK	0.242	0.241	0.24	0.278	0.241	0.259	25.36
446	KOTA SORONG	0.159	0.184	0.115	0.177	0.172	0.146	9.19
447	KOTA SUBULUSSALAM	0.126	0.105	0.096	0.209	0.116	0.153	3.69
448	KOTA SUKABUMI	0.107	0.126	0.113	0.181	0.116	0.147	13.79
449	KOTA SUNGAI PENUH	0.094	0.112	0.046	0.131	0.103	0.089	9.06
450	KOTA SURABAYA	0.71	0.634	0.698	0.78	0.672	0.739	71.9
451	KOTA SURAKARTA	0.302	0.26	0.326	0.467	0.281	0.396	26.54
452	KOTA TANGERANG	0.197	0.202	0.2	0.269	0.2	0.234	9.46
453	KOTA TANGERANG SELATAN	0.04	0.037	0.028	0.041	0.038	0.035	3.57
454	KOTA TANJUNG BALAI	0.171	0.259	0.203	0.244	0.215	0.223	11.41
455	KOTA TANJUNG PINANG	0.148	0.179	0.141	0.252	0.163	0.196	18.65
456	KOTA TARAKAN	0.175	0.196	0.178	0.235	0.185	0.206	16.24
457	KOTA TASEK MALAYA	0.089	0.221	0.136	0.235	0.155	0.185	17.64
458	KOTA TEBING TINGGI	0.062	0.087	0.324	0.679	0.075	0.502	26.84
459	KOTA TEGAL	0.111	0.116	0.102	0.178	0.114	0.14	13.19
460	KOTA TERNATE	0.141	0.193	0.187	0.277	0.167	0.233	8.11
461	KOTA TIDORE KEP.	0.117	0.139	0.124	0.162	0.128	0.143	13.85
462	KOTA TOMOHON	0.065	0.046	0.073	0.037	0.055	0.055	5.51
463	KOTA TUAL	0.137	0.165	0.161	0.246	0.151	0.204	11.5
464	KOTA YOGYAKARTA	0.272	0.286	0.262	0.327	0.279	0.294	25.53
465	KAB. DAIRI	0.041	0.058	0.205	0.279	0.049	0.242	13.64
466	KAB. TAPANULI UTARA	0.01	0.022	0.047	0	0.016	0.023	1.09
467	KOTA PALANGKA RAYA	0.181	0.126	0.174	0.247	0.153	0.211	6.5
468	KAB. BARITO SELATAN	0	0	0	0	0	0	0
469	KAB. BURU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0
470	KAB. BUTON UTARA	0	0	0	0	0	0	0
471	KAB. DEIYAI	0	0	0	0	0	0	0
472	KAB. DOGIYAI	0	0	0	0	0	0	0
473	KAB. ENDE	0	0	0	0	0	0	0
474	KAB. INTAN JAYA	0	0	0	0	0	0	0

475	KAB. JAYAPURA	0	0	0	0	0	0	0
476	KAB. JAYAWIJAYA	0	0	0	0	0	0	0
477	KAB. KEEROM	0	0	0	0	0	0	0
478	KAB. KEP. TANIMBAR	0	0	0	0	0	0	0
479	KAB. KEP. YAPEN	0	0	0	0	0	0	0
480	KAB. LANNY JAYA	0	0	0	0	0	0	0
481	KAB. MALUKU BARAT DAYA	0	0	0	0	0	0	0
482	KAB. MAMASA	0	0	0	0	0	0	0
483	KAB. MAMBERAMO TENGAH	0	0	0	0	0	0	0
484	KAB. MAMUJU TENGAH	0	0	0	0	0	0	0
485	KAB. MANOKWARI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0
486	KAB. NDUGA	0	0	0	0	0	0	0
487	KAB. PANIAI	0	0	0	0	0	0	0
488	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	0	0	0	0	0	0	0
489	KAB. PUNCAK JAYA	0	0	0	0	0	0	0
490	KAB. RAJA AMPAT	0	0	0	0	0	0	0
491	KAB. SIMALUNGUN	0	0	0	0	0	0	0
492	KAB. TOLIKARA	0	0	0	0	0	0	0
493	KAB. TORAJA UTARA	0	0	0	0	0	0	0
494	KAB. YALIMO	0	0	0	0	0	0	0
495	KOTA BAUBAU	0	0	0	0	0	0	0

Catatan

Pengukuran IPLM dan TKM hanya dilakukan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang urusan perpustakaanannya ditangani oleh kelembagaan setingkat dinas.

NILAI TKM PROVINSI

No	Provinsi	Pra Membaca	Saat Membaca	Pasca Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Kategori Penilaian
1	Aceh	54.24	58.7	61.92	59.23	rendah
2	Sumatera Utara	54.29	58.91	61.99	59.36	rendah
3	Sumatera Barat	54.55	58.15	63.16	59.42	rendah
4	Riau	53.34	57.72	61.9	58.59	rendah
5	Jambi	53.28	56.82	60.89	57.77	rendah
6	Sumatera Selatan	56.08	60.59	63.1	60.86	rendah
7	Bengkulu	53.02	57.25	60.27	57.74	rendah
8	Lampung	53.95	58.4	61.23	58.79	rendah
9	Kepulauan Bangka Belitung	53.55	57.12	61.02	58	rendah
10	Kepulauan Riau	54.1	58.27	62.89	59.33	rendah
11	DKI Jakarta	51.41	55.61	61.89	57.23	rendah
12	Jawa Barat	53.93	57.81	63.24	59.19	rendah
13	Jawa Tengah	52.18	55.87	60.84	57.11	rendah
14	DI Yogyakarta	50.63	54.12	59.25	55.44	rendah
15	Jawa Timur	53.62	57.9	62.29	58.86	rendah
16	Banten	51.53	55.36	60.16	56.53	rendah
17	Nusa Tenggara Barat	56.04	60.04	64.85	61.19	rendah
18	Nusa Tenggara Timur	55.84	61.42	65.38	62.05	rendah
19	Kalimantan Barat	54.61	59.11	62.95	59.85	rendah
20	Kalimantan Tengah	51.25	55.56	59.18	56.24	rendah
21	Kalimantan Selatan	51.92	56.02	60.69	57.1	rendah
22	Kalimantan Timur	52.7	56.21	62.26	57.86	rendah
23	Kalimantan Utara	53.58	57.73	62.65	58.89	rendah
24	Sulawesi Utara	53.94	57.75	62.05	58.75	rendah
25	Sulawesi Tengah	54.1	58.88	62.54	59.51	rendah
26	Sulawesi Selatan	54.76	58.81	63.29	59.84	rendah
27	Sulawesi Tenggara	53.43	57.8	61.86	58.64	rendah
28	Gorontalo	54.18	58.36	62.37	59.2	rendah
29	Sulawesi Barat	44.54	47.95	51.21	48.63	sangat rendah
30	Maluku	51.94	57.05	59.94	57.38	rendah
31	Maluku Utara	55.61	60.26	63.2	60.66	rendah
32	Papua	46.79	48.77	56.24	51.12	rendah
33	Papua Barat	46.13	50.92	52.38	50.77	rendah

Kategori	Skala
Sangat Rendah	< 50
Rendah	50 – 64
Sedang	65 – 79
Tinggi	80 - 90
Sangat Tinggi	>90

NILAI TKM KABUPATEN/KOTA

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Pra Membaca	Saat Membaca	Pasca Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Kategori Penilaian
1	Aceh	Kab. Aceh Barat	56.76	60.64	66.59	62.21	rendah
2	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	21.57	23.71	25.33	23.99	sangat rendah
3	Aceh	Kab. Aceh Besar	54.04	58.37	62.23	59.14	rendah
4	Aceh	Kab. Aceh Jaya	56.93	60.85	66.01	62.14	rendah
5	Aceh	Kab. Aceh Selatan	58.52	63.82	67.49	64.4	rendah
6	Aceh	Kab. Aceh Singkil	54.65	59.29	62.44	59.77	rendah
7	Aceh	Kab. Aceh Tamiang	55.97	62.41	64.33	62.2	rendah
8	Aceh	Kab. Aceh Tengah	54.2	58.77	62.19	59.35	rendah
9	Aceh	Kab. Aceh Tenggara	56.03	60.05	64.72	61.15	rendah
10	Aceh	Kab. Aceh Timur	56.97	61.51	64.54	61.97	rendah
11	Aceh	Kab. Aceh Utara	55.25	60.11	62.25	60.21	rendah
12	Aceh	Kab. Bener Meriah	54.68	59.23	61.34	59.36	rendah
13	Aceh	Kab. Bireuen	54.65	59.63	64.47	60.65	rendah
14	Aceh	Kab. Gayo Lues	51.71	55.18	56.69	55.24	rendah
15	Aceh	Kab. Nagan Raya	53.71	58.72	59.83	58.43	rendah
16	Aceh	Kab. Pidie	59.11	63.66	69.08	64.96	rendah
17	Aceh	Kab. Pidie Jaya	58.67	61.89	65.09	62.6	rendah
18	Aceh	Kab. Simeulue	33.08	35.8	37.44	36.01	sangat rendah
19	Aceh	Kota Banda Aceh	55.89	61.2	65.28	61.91	rendah
20	Aceh	Kota Langsa	54.98	59.24	62.46	59.8	rendah
21	Aceh	Kota Lhokseumawe	57.28	60.94	67.9	62.9	rendah
22	Aceh	Kota Sabang	46.38	49.59	54.99	51.06	rendah
23	Aceh	Kota Subulussalam	31.69	33.71	37.03	34.61	sangat rendah
24	Sumatera Utara	Kab. Asahan	53.41	57.73	60.25	58.03	rendah
25	Sumatera Utara	Kab. Dairi	54.74	60.45	64.33	61.03	rendah
26	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	54.71	59.4	61.95	59.66	rendah
27	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu	53.94	57.85	59.91	58.05	rendah
28	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	54.27	60.24	62.68	60.28	rendah
29	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara	53.97	58.56	59.79	58.37	rendah
30	Sumatera Utara	Kab. Langkat	55.16	59.32	61.62	59.57	rendah
31	Sumatera Utara	Kab. Nias	59	65.62	68.04	65.58	sedang
32	Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	19.52	21.58	22.63	21.67	sangat rendah
33	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	61.3	68.46	71.01	68.39	sedang
34	Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	57.91	64.07	68.19	64.68	rendah
35	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	31.96	34.07	34.98	34.11	sangat rendah
36	Sumatera Utara	Kab. PakPak Bharat	55.17	59.97	63.11	60.42	rendah
37	Sumatera Utara	Kab. Samosir	56.11	59.74	63.79	60.68	rendah
38	Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	54.23	58.48	61.65	59.02	rendah
39	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	52.48	57.24	60.19	57.62	rendah
40	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	56.51	60.6	63.87	61.2	rendah
41	Sumatera Utara	Kota Binjai	51.69	56.59	59.9	57.08	rendah
42	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	56.82	61.77	66.13	62.64	rendah
43	Sumatera Utara	Kota Medan	54.46	58.96	62.93	59.74	rendah
44	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	54.06	58.07	62.71	59.16	rendah
45	Sumatera Utara	Kota Sibolga	53.7	57.72	60.37	58.11	rendah
46	Sumatera Utara	Kota Tanjung balai	54.4	58.5	60.97	58.82	rendah
47	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	52.7	56.44	59.88	57.14	rendah
48	Sumatera Utara	Kab. Batu bara	54.99	59.09	61.34	59.33	rendah
49	Sumatera Utara	Kab. Karo	52.29	56.93	61.73	57.98	rendah

50	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	54.58	58.86	62.87	59.69	rendah
51	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas	55.42	60.29	61.66	60.11	rendah
52	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	52.9	57.44	61.12	58.11	rendah
53	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	56.84	61.22	64.01	61.61	rendah
54	Sumatera Utara	Kota Padangsidimpuan	51.05	55.37	59.25	56.13	rendah
55	Sumatera Barat	Kab. Agam	53.98	56.54	63.15	58.52	rendah
56	Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya	53.77	56.97	60.75	57.87	rendah
57	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	55.05	60.49	63.03	60.64	rendah
58	Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota	53.21	56.47	62.92	58.29	rendah
59	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	52.55	55.42	60.29	56.74	rendah
60	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	54.72	58.35	60.96	58.78	rendah
61	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	57.26	60.6	66.59	62.26	rendah
62	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	58.21	61.86	66.02	62.85	rendah
63	Sumatera Barat	Kab. Sijunjung	55.19	58.39	64.96	60.27	rendah
64	Sumatera Barat	Kab. Solok	53.8	57.52	65.06	59.66	rendah
65	Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	56.22	62.35	64.77	62.36	rendah
66	Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar	53.98	56.85	64.14	59.03	rendah
67	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	42.08	43.64	47.53	44.81	sangat rendah
68	Sumatera Barat	Kota Padang	55.21	59.24	63.49	60.19	rendah
69	Sumatera Barat	Kota Padang panjang	66.66	69.89	74.11	70.99	sedang
70	Sumatera Barat	Kota Pariaman	51.73	55.23	59.71	56.32	rendah
71	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	54.4	56.02	63.47	58.43	rendah
72	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	53.3	56.75	63.54	58.67	rendah
73	Sumatera Barat	Kota Solok	53.27	57.44	63.79	59.1	rendah
74	Riau	Kab. Bengkalis	54.22	58.29	61.88	59	rendah
75	Riau	Kab. Indragiri Hilir	53.81	58.45	63.45	59.57	rendah
76	Riau	Kab. Indragiri Hulu	51.98	56.61	62.94	58.19	rendah
77	Riau	Kab. Kampar	56.66	61.74	64.94	62.18	rendah
78	Riau	Kab. Kepulauan Meranti	53.97	57.62	62.23	58.74	rendah
79	Riau	Kab. Kuantan Singingi	53.58	57.51	62.67	58.79	rendah
80	Riau	Kab. Pelalawan	50.76	55.98	59.38	56.45	rendah
81	Riau	Kab. Rokan Hilir	55.8	60.11	65.04	61.26	rendah
82	Riau	Kab. Rokan Hulu	54.29	58.19	61.32	58.77	rendah
83	Riau	Kab. Siak	54.3	58.33	61.83	59.02	rendah
84	Riau	Kota Dumai	53.89	56.74	61.7	58.1	rendah
85	Riau	Kota Pekanbaru	52.48	56.98	61.03	57.79	rendah
86	Jambi	Kab. Batanghari	55.32	57.1	62.74	58.85	rendah
87	Jambi	Kab. Bungo	24.17	26.29	27.7	26.49	sangat rendah
88	Jambi	Kab. Kerinci	55.9	60.17	65.3	61.4	rendah
89	Jambi	Kab. Merangin	53.65	58.38	62.33	59.12	rendah
90	Jambi	Kab. Muaro Jambi	54.57	57.97	61.9	58.9	rendah
91	Jambi	Kab. Sarolangun	54.99	58.47	62	59.24	rendah
92	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	53.82	57.41	62.28	58.64	rendah
93	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	51.46	53.83	57.76	54.9	rendah
94	Jambi	Kab. Tebo	17.68	18.85	20.69	19.34	sangat rendah
95	Jambi	Kota Jambi	51.72	55.93	61.26	57.22	rendah
96	Jambi	Kota Sungai Penuh	54.67	58.87	64.05	60.12	rendah
97	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	56.53	60.86	65.25	61.82	rendah
98	Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang	55.63	60.76	63.12	60.89	rendah
99	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	57.09	60.81	63.11	61.13	rendah
100	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	57.83	61.71	65.01	62.36	rendah
101	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	55.8	59.62	63.98	60.64	rendah

102	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	53.3	56.76	59.29	57.18	rendah
103	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	56.63	61.01	63.43	61.28	rendah
104	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir	57.61	60.74	66	62.18	rendah
105	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	58.68	64.3	66.51	64.32	rendah
106	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	55.31	58.27	62.08	59.22	rendah
107	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	56.47	61.34	63.09	61.3	rendah
108	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	50.9	55.57	56.66	55.31	rendah
109	Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	55.65	60.85	63.94	61.23	rendah
110	Sumatera Selatan	Kota Lubuk linggau	54.38	58.97	62.86	59.71	rendah
111	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	55.5	59.69	61.38	59.72	rendah
112	Sumatera Selatan	Kota Palembang	55.54	60.54	63.72	60.98	rendah
113	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	58.66	63.38	64.9	63.29	rendah
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	54.09	59.45	61.84	59.56	rendah
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	54.44	58.6	61.49	59.05	rendah
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	55.44	58.45	62.28	59.4	rendah
117	Bengkulu	Kab. Kaur	58.53	63.11	65.79	63.44	rendah
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	52.23	55.85	59.21	56.54	rendah
119	Bengkulu	Kab. Lebong	52.7	55.82	58.5	56.34	rendah
120	Bengkulu	Kab. Muko Muko	21.66	23.15	24.8	23.53	sangat rendah
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	50.35	55.61	58.93	56.04	rendah
122	Bengkulu	Kab. Seluma	55.73	61.46	63.54	61.41	rendah
123	Bengkulu	Kota Bengkulu	54.05	58.25	62.26	59.09	rendah
124	Lampung	Kab. Lampung Barat	55.39	59.31	61.4	59.52	rendah
125	Lampung	Kab. Lampung Selatan	53.07	57.73	60.82	58.18	rendah
126	Lampung	Kab. Lampung Tengah	53.14	56.82	58.69	56.98	rendah
127	Lampung	Kab. Lampung Timur	53.27	58.56	61.17	58.75	rendah
128	Lampung	Kab. Lampung Utara	53.42	58.46	62.67	59.24	rendah
129	Lampung	Kab. Mesuji	54.58	59.05	61.57	59.33	rendah
130	Lampung	Kab. Pesawaran	52.57	56.84	60.15	57.42	rendah
131	Lampung	Kab. Pringsewu	54.68	58.39	62.81	59.45	rendah
132	Lampung	Kab. Tanggamus	54.32	58.64	61.74	59.15	rendah
133	Lampung	Kab. Tulang Bawang	54.61	58.05	60.87	58.58	rendah
134	Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	53.55	57.53	60.02	57.86	rendah
135	Lampung	Kab. Way Kanan	57.37	61.57	63.85	61.82	rendah
136	Lampung	Kota Bandar Lampung	52.75	56.34	60.58	57.34	rendah
137	Lampung	Kota Metro	52.1	55.02	59.94	56.35	rendah
138	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	52.63	57.05	60.04	57.5	rendah
139	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	54.34	57.6	61.31	58.47	rendah
140	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	55.61	59.93	64.11	60.81	rendah
141	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	52.37	56.49	59.03	56.82	rendah
142	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	52.55	54.87	60.12	56.41	rendah
143	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	53.29	56.13	60.18	57.18	rendah
144	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	52.82	55.27	60.3	56.71	rendah
145	Kep. Riau	Kab. Bintan	50.97	55.58	58.74	56.05	rendah
146	Kep. Riau	Kab. Karimun	53.39	58.82	62.74	59.45	rendah
147	Kep. Riau	Kab. Kepulauan Anambas	54.74	59.87	64.86	60.92	rendah
148	Kep. Riau	Kab. Lingga	53.25	57.28	61.86	58.34	rendah
149	Kep. Riau	Kab. Natuna	53.67	58.14	62.06	58.91	rendah
150	Kep. Riau	Kota Batam	56.09	59.25	65.77	61.13	rendah
151	Kep. Riau	Kota Tanjung Pinang	53.63	57.14	59.95	57.66	rendah
152	Dki Jakarta	Kab. Adm. Kep. Seribu	56.67	60.83	64.3	61.49	rendah
153	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	49.89	52.56	57.14	53.8	rendah

154	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	51.07	55.45	62.28	57.24	rendah
155	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	49.28	54.69	66.11	57.93	rendah
156	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	51.02	54.95	62.01	56.88	rendah
157	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	52.83	57.95	62.32	58.78	rendah
158	Jawa Barat	Kab. Bandung	53.37	57.05	61.68	58.18	rendah
159	Jawa Barat	Kab. Bandung Barat	54.66	58.21	63.8	59.69	rendah
160	Jawa Barat	Kab. Bekasi	53.13	57.65	62.41	58.7	rendah
161	Jawa Barat	Kab. Bogor	53.49	57.67	65.54	59.86	rendah
162	Jawa Barat	Kab. Ciamis	55.52	58.95	63.15	59.97	rendah
163	Jawa Barat	Kab. Cianjur	54.81	58.73	63.22	59.78	rendah
164	Jawa Barat	Kab. Cirebon	52	57.37	61.63	58.12	rendah
165	Jawa Barat	Kab. Garut	53.1	56.99	62.18	58.28	rendah
166	Jawa Barat	Kab. Indramayu	55.5	59.87	65.42	61.23	rendah
167	Jawa Barat	Kab. Karawang	53.49	58.25	62.62	59.13	rendah
168	Jawa Barat	Kab. Kuningan	54.18	57.71	64.57	59.64	rendah
169	Jawa Barat	Kab. Majalengka	52.1	56.63	62.01	57.89	rendah
170	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	55.18	60.63	64.09	61.1	rendah
171	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	53.81	56.82	64.28	59.03	rendah
172	Jawa Barat	Kab. Subang	57.26	61.69	68.89	63.62	rendah
173	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	56.39	61.56	68.83	63.41	rendah
174	Jawa Barat	Kab. Sumedang	56.18	60.5	64.88	61.46	rendah
175	Jawa Barat	Kota Bandung	54.44	56.75	64.76	59.26	rendah
176	Jawa Barat	Kota Banjar	52.32	56.1	60.57	57.15	rendah
177	Jawa Barat	Kota Bekasi	49.74	52.11	60.2	54.62	rendah
178	Jawa Barat	Kota Bogor	55.75	58.87	66.72	61.21	rendah
179	Jawa Barat	Kota Cirebon	52.54	56.52	62.81	58.18	rendah
180	Jawa Barat	Kota Depok	52.44	55.48	61.71	57.25	rendah
181	Jawa Barat	Kota Sukabumi	55.2	58.76	65.76	60.74	rendah
182	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	58.19	61.7	67.73	63.36	rendah
183	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	50.62	54.37	58.05	55.15	rendah
184	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	50.57	54.87	58.43	55.53	rendah
185	Jawa Tengah	Kab. Batang	52.35	54.98	62.29	57.19	rendah
186	Jawa Tengah	Kab. Blora	54.33	58.71	64.74	60.23	rendah
187	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	50.53	54.47	58.16	55.22	rendah
188	Jawa Tengah	Kab. Brebes	53.9	57.52	63.04	58.97	rendah
189	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	54.27	57.78	62.61	59.01	rendah
190	Jawa Tengah	Kab. Demak	54.34	58.15	61.72	58.89	rendah
191	Jawa Tengah	Kab. Grobogan	51.07	56.35	58.66	56.43	rendah
192	Jawa Tengah	Kab. Jepara	52.72	56.61	62.04	57.99	rendah
193	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	52.39	56.08	61.41	57.45	rendah
194	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	53.55	57.39	63.81	59.12	rendah
195	Jawa Tengah	Kab. Kendal	58.18	62.45	68.51	64.01	rendah
196	Jawa Tengah	Kab. Klaten	53.84	56.46	63.26	58.5	rendah
197	Jawa Tengah	Kab. Kudus	51.92	56.19	61.85	57.59	rendah
198	Jawa Tengah	Kab. Magelang	51.18	55.32	59.04	56.06	rendah
199	Jawa Tengah	Kab. Pati	49.67	54.27	57.42	54.73	rendah
200	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	49.54	51.72	56.3	53.03	rendah
201	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	56.72	60.63	65.05	61.67	rendah
202	Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	51.89	55.06	60.05	56.38	rendah
203	Jawa Tengah	Kab. Purworejo	51.95	55.77	60.29	56.83	rendah
204	Jawa Tengah	Kab. Rembang	50.6	56.16	60.04	56.74	rendah
205	Jawa Tengah	Kab. Semarang	48.72	52.11	56.28	53.1	rendah

206	Jawa Tengah	Kab. Sragen	52.34	55.69	61.15	57.15	rendah
207	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	52.42	56.52	63.57	58.43	rendah
208	Jawa Tengah	Kab. Tegal	52.03	55.2	60.73	56.71	rendah
209	Jawa Tengah	Kab. Temanggung	53.1	56.01	61.7	57.62	rendah
210	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	52.05	55.23	60.21	56.55	rendah
211	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	52.68	56.06	60.89	57.3	rendah
212	Jawa Tengah	Kota Magelang	54.2	56.98	62.24	58.46	rendah
213	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	52.48	54.84	62.73	57.29	rendah
214	Jawa Tengah	Kota Salatiga	49.19	52.29	58.49	54.04	rendah
215	Jawa Tengah	Kota Semarang	53.89	56.63	63.07	58.53	rendah
216	Jawa Tengah	Kota Surakarta	51.58	55.03	61.88	56.96	rendah
217	Jawa Tengah	Kota Tegal	52.41	56.14	63.17	58.09	rendah
218	Di Yogyakarta	Kab. Bantul	50.78	55.06	59.23	55.93	rendah
219	Di Yogyakarta	Kab. Gunungkidul	50.41	53.3	57.97	54.54	rendah
220	Di Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	51.92	55.42	61.55	57.09	rendah
221	Di Yogyakarta	Kab. Sleman	50.06	53	60.05	55.07	rendah
222	Di Yogyakarta	Kota Yogyakarta	50.26	53.17	59.05	54.83	rendah
223	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	54.98	60.02	64.64	60.96	rendah
224	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	56.15	61.48	67.54	62.88	rendah
225	Jawa Timur	Kab. Blitar	50.2	55.09	58	55.43	rendah
226	Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	53.29	58.38	62.5	59.12	rendah
227	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	51.5	55.81	59.38	56.47	rendah
228	Jawa Timur	Kab. Gresik	61.49	65.84	70.86	67.04	sedang
229	Jawa Timur	Kab. Jember	52.79	57.27	61.46	58.13	rendah
230	Jawa Timur	Kab. Jombang	53.28	56.86	63.47	58.69	rendah
231	Jawa Timur	Kab. Kediri	51.8	55.56	61.17	57.01	rendah
232	Jawa Timur	Kab. Lamongan	54.88	59.73	66.69	61.51	rendah
233	Jawa Timur	Kab. Lumajang	52.75	57.51	61.72	58.33	rendah
234	Jawa Timur	Kab. Madiun	53.92	57.82	63.06	59.13	rendah
235	Jawa Timur	Kab. Magetan	55.63	60.48	65.36	61.54	rendah
236	Jawa Timur	Kab. Malang	51.75	56.54	60.93	57.42	rendah
237	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	59.34	62.37	67.77	63.89	rendah
238	Jawa Timur	Kab. Nganjuk	53.67	57.24	60.61	57.94	rendah
239	Jawa Timur	Kab. Ngawi	51.89	55.31	59.8	56.42	rendah
240	Jawa Timur	Kab. Pacitan	51.31	55.18	59.28	56.09	rendah
241	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	50.46	55.49	58.84	55.96	rendah
242	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	52.36	56.95	59.18	57.11	rendah
243	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	50.54	53.03	61	55.49	rendah
244	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	58.27	62.61	66.54	63.42	rendah
245	Jawa Timur	Kab. Sampang	56.46	60.41	64.1	61.18	rendah
246	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	53.4	56.71	61.73	58.03	rendah
247	Jawa Timur	Kab. Situbondo	54.95	58.58	63.06	59.67	rendah
248	Jawa Timur	Kab. Sumenep	51.8	55.59	60.08	56.65	rendah
249	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	51.98	56.7	60.94	57.54	rendah
250	Jawa Timur	Kab. Tuban	54.93	58.63	64.23	60.1	rendah
251	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	51.94	56.61	60.44	57.31	rendah
252	Jawa Timur	Kota Batu	51.03	55.3	60.99	56.71	rendah
253	Jawa Timur	Kota Blitar	46.96	52.59	60.25	54.47	rendah
254	Jawa Timur	Kota Kediri	51.25	54.89	59.39	55.97	rendah
255	Jawa Timur	Kota Malang	53.81	58.55	61.9	59.08	rendah
256	Jawa Timur	Kota Mojokerto	60.7	62.71	63.66	62.82	rendah
257	Jawa Timur	Kota Pasuruan	53.47	57.13	61.59	58.2	rendah

258	Jawa Timur	Kota Probolinggo	55.46	57.58	62.5	59.04	rendah
259	Jawa Timur	Kota Surabaya	70.72	79.57	82.47	79.42	sedang
260	Jawa Timur	Kota Madiun	58.98	62.56	70.49	64.88	rendah
261	Banten	Kab. Lebak	47.58	51.94	55.6	52.63	rendah
262	Banten	Kab. Pandeglang	51.91	57.13	61.14	57.82	rendah
263	Banten	Kab. Serang	48.26	51.76	58.75	53.72	rendah
264	Banten	Kab. Tangerang	53.94	57.3	61.87	58.46	rendah
265	Banten	Kota Cilegon	54.21	57.41	63.38	59.08	rendah
266	Banten	Kota Serang	30.97	33.3	37.98	34.62	sangat rendah
267	Banten	Kota Tangerang	55.7	59.41	64.13	60.57	rendah
268	Banten	Kota Tangerang Selatan	51.47	55.18	59.23	56.09	rendah
269	Bali	Kab. Badung	61.34	64.38	66.58	64.78	rendah
270	Bali	Kab. Buleleng	5.86	6.17	6.49	6.24	sangat rendah
271	Bali	Kab. Gianyar	54.46	58.17	62.02	59.02	rendah
272	Bali	Kab. Karangasem	53.65	58.14	58.65	57.71	rendah
273	Bali	Kab. Klungkung	54.07	57.19	60.43	57.92	rendah
274	Bali	Kab. Tabanan	54.6	57.74	60.11	58.16	rendah
275	Bali	Kota Denpasar	54.93	58.77	62.72	59.65	rendah
276	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	59.48	63.76	66.6	64.2	rendah
277	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	56.69	61.3	65.13	62.03	rendah
278	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	54.28	57.05	63.05	58.79	rendah
279	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah	54.54	58.39	63.75	59.75	rendah
280	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	53.96	58.56	64.46	60	rendah
281	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara	52.92	56.36	59.14	56.87	rendah
282	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	54.18	58.38	64.03	59.8	rendah
283	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	57.78	62.03	67.57	63.41	rendah
284	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	63.41	68.24	72.62	69.15	sedang
285	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	53.96	57.47	62.87	58.89	rendah
286	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	56.6	61.29	64.2	61.68	rendah
287	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	54.64	60.81	64.43	61.23	rendah
288	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	56.4	62.92	67.37	63.59	rendah
289	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	53.25	58.57	63.38	59.52	rendah
290	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	57.27	63.06	65.21	63.03	rendah
291	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	56.87	61.47	65.71	62.34	rendah
292	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	58.12	64.76	68.1	65.03	sedang
293	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	55.14	62.02	67.05	62.84	rendah
294	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	55.6	61.67	66.41	62.5	rendah
295	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	57.01	64.98	69.88	65.6	sedang
296	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo	54.84	59.63	62.61	60.03	rendah
297	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	55.23	60	64.8	61.04	rendah
298	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	56.55	62.21	66.15	62.82	rendah
299	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	55.83	61.63	63.78	61.6	rendah
300	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	51.79	57.66	62.19	58.43	rendah
301	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	56.83	62.15	66.95	63.12	rendah
302	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	57.35	62.12	65.29	62.6	rendah
303	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah	55.63	60.6	65.44	61.62	rendah
304	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	57.84	63.35	66.88	63.85	rendah
305	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	54.64	60.79	64.17	61.13	rendah
306	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	58.06	63.01	66.26	63.49	rendah
307	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	53.93	57.96	63.9	59.5	rendah
308	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	53.14	56.9	62.67	58.41	rendah
309	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	54.37	60.12	63.6	60.55	rendah

310	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	51.86	56.35	58.06	56.34	rendah
311	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	66.36	69.36	70.64	69.46	sedang
312	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	52.5	58.04	63.34	59.13	rendah
313	Kalimantan Barat	Kab. Landak	54.18	59.16	62.38	59.61	rendah
314	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	52.03	57.98	59.17	57.58	rendah
315	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	54.88	58.17	63.33	59.54	rendah
316	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	50.98	55.89	60.96	56.99	rendah
317	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	64.27	67.79	68.7	67.68	sedang
318	Kalimantan Barat	Kab. Sekadau	52.69	57.09	60.34	57.63	rendah
319	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	50.65	56.37	60.58	57.05	rendah
320	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	57.69	60.27	66.45	62.11	rendah
321	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	55.03	58.5	64.7	60.22	rendah
322	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	3.89	4.27	4.7	4.37	sangat rendah
323	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	52.44	56.12	61.03	57.34	rendah
324	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	36.6	38.81	41.52	39.47	sangat rendah
325	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	54.98	59.34	62.95	60.02	rendah
326	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	53.83	57.9	62.41	58.93	rendah
327	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	53.27	56.88	63.8	58.82	rendah
328	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	52.35	57.61	60.43	57.87	rendah
329	Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau	53.07	57.77	61.27	58.36	rendah
330	Kalimantan Tengah	Kab. Murung Raya	55.1	60.96	64.98	61.58	rendah
331	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	50.18	53.2	57.55	54.32	rendah
332	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	53.91	58.33	61.03	58.68	rendah
333	Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara	53.87	58.92	62.17	59.37	rendah
334	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	17	18.27	19.62	18.57	sangat rendah
335	Kalimantan Selatan	Kab. Balangan	52.79	57	59.46	57.29	rendah
336	Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	51.48	56.07	61.03	57.18	rendah
337	Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala	50.62	55.14	58.71	55.77	rendah
338	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	59.54	64.74	72.15	66.64	sedang
339	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	53.39	56.03	60.9	57.39	rendah
340	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	52.13	56.45	60.73	57.36	rendah
341	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	53.98	57.66	60.76	58.26	rendah
342	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	51.72	55.94	59.72	56.69	rendah
343	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	53.96	57.13	61.27	58.16	rendah
344	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	50.26	55.2	60.28	56.29	rendah
345	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	51.46	54.59	58.67	55.59	rendah
346	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	49.64	53.48	59.11	54.92	rendah
347	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	50.87	54.62	61.46	56.5	rendah
348	Kalimantan Timur	Kab. Berau	51.76	56	62.37	57.65	rendah
349	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	49.4	54.14	59.97	55.53	rendah
350	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	53.19	55.77	60.3	57.02	rendah
351	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	52.81	56.76	61.13	57.76	rendah
352	Kalimantan Timur	Kab. Paser	53.11	56.2	63.01	58.18	rendah
353	Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	51.37	54.07	60.28	55.88	rendah
354	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	53.51	56.24	64.45	58.76	rendah
355	Kalimantan Timur	Kota Bontang	54.3	58.69	65.47	60.47	rendah
356	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	52.46	56.61	63.76	58.55	rendah
357	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	52.41	56.84	60.96	57.68	rendah
358	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	55.54	60.21	64.83	61.2	rendah
359	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	53.74	58.15	62.06	58.92	rendah
360	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	53.86	56.18	61.75	57.84	rendah
361	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	51.93	56.19	62.93	57.97	rendah

362	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow	53.94	58.14	60.26	58.32	rendah
363	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur	55.12	59.07	62.33	59.68	rendah
364	Sulawesi Utara	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	53.57	57.48	61.65	58.41	rendah
365	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	55.87	59.92	64.41	60.95	rendah
366	Sulawesi Utara	Kota Bitung	55.53	58.44	63.37	59.79	rendah
367	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	53.84	58	61.07	58.52	rendah
368	Sulawesi Utara	Kota Manado	53.17	57.69	63.02	58.94	rendah
369	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	51.02	54.59	58.35	55.42	rendah
370	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	54.98	58.47	62.16	59.3	rendah
371	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	53.57	57.41	60.05	57.82	rendah
372	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	54.53	58.8	63.61	59.91	rendah
373	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	55.27	61.12	64.77	61.6	rendah
374	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	53.7	56.84	62.57	58.43	rendah
375	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	55.5	59.6	64.68	60.83	rendah
376	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	53.43	56.24	61.39	57.67	rendah
377	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	54.85	59.19	64.72	60.55	rendah
378	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	54.54	58.81	64.51	60.23	rendah
379	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	55.98	60.37	64.08	61.09	rendah
380	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	56.15	61.37	64.13	61.63	rendah
381	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	53.73	58.27	63.15	59.36	rendah
382	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	52.67	57.89	60	57.92	rendah
383	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	52.86	57.7	61.53	58.38	rendah
384	Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	54.34	58.96	63.22	59.83	rendah
385	Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli	56.06	60.73	63.22	60.98	rendah
386	Sulawesi Tengah	Kota Palu	54.08	58.68	63.77	59.84	rendah
387	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	52.47	58.13	61.26	58.45	rendah
388	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	50.1	54.6	56.6	54.68	rendah
389	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	55.77	60.52	63.07	60.78	rendah
390	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	55.91	58.26	62.4	59.41	rendah
391	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	54.37	58.35	63.18	59.51	rendah
392	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	54.81	58.55	63.17	59.67	rendah
393	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	56.55	60.72	64.92	61.63	rendah
394	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	56.57	60.4	66.1	61.89	rendah
395	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	54.66	59.05	61.71	59.39	rendah
396	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	57.38	61.21	65.51	62.22	rendah
397	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	52.19	55.25	59.25	56.24	rendah
398	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	55.69	59.47	63.59	60.41	rendah
399	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	55.19	59.04	65.27	60.71	rendah
400	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	54.73	59.84	64.12	60.65	rendah
401	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	56.54	59.02	65.72	61.05	rendah
402	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	55.77	60.17	65.68	61.51	rendah
403	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	53.62	57.47	60.64	58.06	rendah
404	Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	55.61	60.23	66.99	61.98	rendah
405	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	53.86	58.57	60.92	58.76	rendah
406	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	58.66	61.97	68.34	63.78	rendah
407	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	53.48	58.21	61.6	58.76	rendah
408	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	51.76	56.62	60	57.14	rendah
409	Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara	54.96	59.9	64.25	60.76	rendah
410	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	53.48	57.98	62.75	59.04	rendah
411	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	53.26	57.15	61.64	58.2	rendah
412	Sulawesi Selatan	Kota Pare Pare	52.91	56.24	62.51	57.99	rendah
413	Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	55.41	60.6	63.64	60.96	rendah

414	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	56.64	61.82	66.35	62.71	rendah
415	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan	57.83	62.6	68.13	63.9	rendah
416	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara	33.61	36.75	39.35	37.24	sangat rendah
417	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	52.71	56.51	58.85	56.82	rendah
418	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	53	57.29	59.35	57.43	rendah
419	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	54.17	59.05	62.55	59.62	rendah
420	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	56.74	61.74	66.11	62.6	rendah
421	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	56.23	59.67	63.18	60.45	rendah
422	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	54.02	57.63	61.15	58.38	rendah
423	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	9.98	10.73	11.22	10.8	sangat rendah
424	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	57.81	62.66	67.39	63.67	rendah
425	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	50.3	54.77	58.65	55.51	rendah
426	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	21.84	23.5	25.9	24.12	sangat rendah
427	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	57.25	61.4	68	63.17	rendah
428	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	42.59	46.72	51.16	47.72	sangat rendah
429	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	55.89	61.6	66.84	62.66	rendah
430	Gorontalo	Kab. Boalemo	53.8	58.64	61.65	59.04	rendah
431	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	54.74	59.15	65.58	60.81	rendah
432	Gorontalo	Kab. Gorontalo	54.7	58.68	61.05	58.98	rendah
433	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	53.47	58.31	62.12	58.99	rendah
434	Gorontalo	Kab. Pohuwato	53.85	57.96	61.83	58.76	rendah
435	Gorontalo	Kota Gorontalo	54.33	57.38	62.08	58.62	rendah
436	Sulawesi Barat	Kab. Majene	54.6	58.7	63.81	59.94	rendah
437	Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	6.61	7.41	8.06	7.52	sangat rendah
438	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	25.86	28.4	30.64	28.84	sangat rendah
439	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	10.1	10.27	11.63	10.73	sangat rendah
440	Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu	40.88	44.31	46.36	44.56	sangat rendah
441	Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	54.9	58.8	62.23	59.48	rendah
442	Maluku	Kab. Buru	61.3	66.58	70.29	67.19	sedang
443	Maluku	Kab. Buru Selatan	17.75	19.25	20.77	19.58	sangat rendah
444	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	55.79	61.76	63.18	61.45	rendah
445	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	7.07	7.78	8.37	7.89	sangat rendah
446	Maluku	Kab. Maluku Tengah	53.5	58.47	62.04	59.05	rendah
447	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	57.04	62.69	66.37	63.22	rendah
448	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.61	4.89	5.14	4.94	sangat rendah
449	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	30.5	32.96	34.25	33.08	sangat rendah
450	Maluku	Kota Ambon	53.5	59.65	62.36	59.75	rendah
451	Maluku	Kota Tual	56.53	61.81	66.23	62.65	rendah
452	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	56.13	60.34	63.97	61.05	rendah
453	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	56.37	61.57	64.2	61.79	rendah
454	Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	55.28	60.05	62.1	60.13	rendah
455	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	54.64	60.21	63.08	60.46	rendah
456	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	55.91	60.32	62.15	60.37	rendah
457	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	54.84	59.23	62.09	59.64	rendah
458	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	56.49	60.96	64.55	61.62	rendah
459	Maluku Utara	Kota Ternate	54.59	59.01	63.49	59.99	rendah
460	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	54.91	58.92	62.49	59.63	rendah
461	Papua	Kab. Jayapura	1.22	1.13	1.07	1.12	sangat rendah
462	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	0.27	0.32	0.29	0.3	sangat rendah
463	Papua	Kab. Sarmi	3.66	3.92	4.28	4.01	sangat rendah
464	Papua	Kab. Supiori	50.94	53.09	61.25	55.66	rendah
465	Papua	Kota Jayapura	1.01	1.21	1.12	1.15	sangat rendah

466	Papua	Kab. Waropen	0.14	0.15	0.12	0.14	sangat rendah
467	Papua	Kab. Keerom	0.12	0.12	0.14	0.13	sangat rendah
468	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	43.62	47.14	51.15	48.07	sangat rendah
469	Papua Barat Daya	Kota Sorong	36.67	40.13	44.83	41.3	sangat rendah
470	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	0.32	0.34	0.36	0.34	sangat rendah
471	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1.01	1.33	1.56	1.36	sangat rendah
472	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0.11	0.1	0.12	0.11	sangat rendah
473	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0.12	0.12	0.14	0.13	sangat rendah
474	Papua Pegunungan	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	0	0
475	Papua Pegunungan	Kab. Nduga	0	0	0	0	0
476	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0	0	0	0	0
477	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0.21	0.25	0.25	0.25	sangat rendah
478	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0	0	0	0	0
479	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1.08	1.06	1.19	1.11	sangat rendah
480	Papua Barat	Kab. Fakfak	53.7	58.78	60.99	58.86	rendah
481	Papua Barat	Kab. Manokwari	49.51	53.93	60.33	55.57	rendah
482	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	23.36	25.37	27.27	25.77	sangat rendah
483	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	49.36	56.21	52.57	53.98	rendah
484	Papua Barat	Kab. Kaimana	54.06	59.42	61.3	59.35	rendah
485	Papua Barat	Kab. Manokwari Selatan	19.68	21.19	22.26	21.36	sangat rendah
486	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	12.12	13.47	13.56	13.32	sangat rendah
487	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0	0	0	0	0
488	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0.14	0.16	0.19	0.17	sangat rendah
489	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	0.27	0.3	0.24	0.27	sangat rendah
490	Papua Tengah	Kab. Mimika	49.25	54.26	59.53	55.41	rendah
491	Papua Tengah	Kab. Paniai	0.16	0.15	0.11	0.14	sangat rendah
492	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0	0
493	Papua Selatan	Kab. Merauke	8.41	9.42	9.65	9.37	sangat rendah
494	Papua Selatan	Kab. Mappi	3.25	3.6	3.71	3.59	sangat rendah
495	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0.14	0.19	0.25	0.21	sangat rendah

Kategori	Skala
Sangat Rendah	< 50
Rendah	50 – 64
Sedang	65 – 79
Tinggi	80 - 90
Sangat Tinggi	>90



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**